



KABUPATEN MAJENE



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

MAJU-MANDIRI-BERBUDAYA

LPPD
2025





BUPATI MAJENE

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan tepat pada waktu yang ditentukan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Implementasi dari Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Barat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini kami sajikan dengan sistematika sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut diatas, sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan umum, perencanaan pembangunan daerah dan penerapan standar pelayanan minimal.
- Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berisi tentang capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (indikator kinerja kunci keluaran; indikator kinerja kunci hasil; indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan), dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang berisi tentang Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.





Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, yang berisi tentang jenis pelayanan dasar yang diterapkan, target pencapaian SPM oleh Daerah, Realisasi SPM dan Alokasi Anggaran yang digunakan.

Bab V : Penutup.

Laporan ini memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan, sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan strategis yang dinamis sesuai Visi dan Misi Kabupaten Majene **“MAJENE MAJU,MANDIRI,BERBUDAYA”**.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Majene, 25 Maret 2026


BUPATI MAJENE,

H.A. ACHMAD SYUKRI, S.E.,MM.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.1.1. Penjelasan Umum	2
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	2
b. Data Geografis Wilayah	2
c. Jumlah Penduduk	4
d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan	4
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	7
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	9
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	9
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	12
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	19
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	21
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	53
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	55
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO	55
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	57
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Per Kategori Urusan	58
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	73
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	75
2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.....	75
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	77
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.....	79
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	80



2.3.5. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja	81
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	87
3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	88
3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN	90
3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	90
3.4. PERMASALAHAN DAN KENDALA.....	93
3.5. SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	94
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	95
4.1. URUSAN PENDIDIKAN	95
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	95
4.2. URUSAN KESEHATAN	104
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	104
4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	135
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	135
4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	142
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	142
4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	145
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	145
4.6. URUSAN SOSIAL	155
4.6.1. Dinas Sosial.....	155
4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN	159
BAB V PENUTUP	169





BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan proses pengelolaan segala Sumber Daya yang dimiliki suatu Daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan tersebut, maka Pemerintah Daerah diberikan Otonomi yang seluas-luasnya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah namun tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan sejalan dengan semangat Pembangunan Kabupaten Majene dengan Visi **“MAJENE MAJU, MANDIRI DAN BERBUDAYA”**.

Sejalan dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta dijalankan mengedepankan aspek dan asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan dan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD Kepala Daerah tersebut bersifat progress report penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan amanah peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Majene berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 untuk disampaikan kepada Pemerintah dan diinformasikan kepada Masyarakat sebagai media informasi dan akuntabilitas publik terhadap kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025. Laporan ini disusun secara komprehensif, terintegrasi dan informatif yang memuat : Perencanaan Pembangunan Daerah; Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas : (1) Capaian Kinerja Makro, (2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, (3) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; (4) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan (5) Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.



1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
4. Peraturan Bupati Majene Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 41).

b. Data Geografis Wilayah

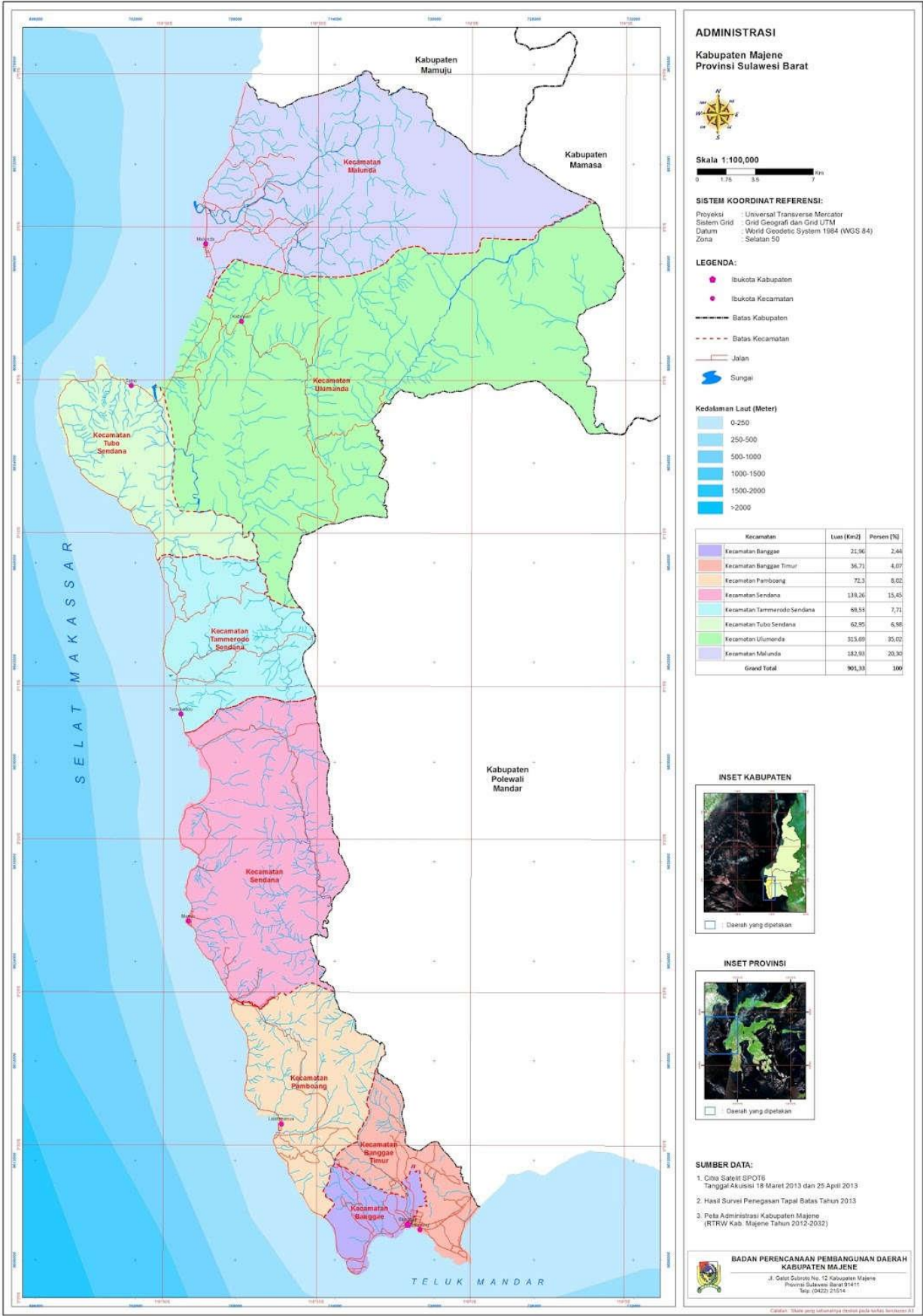
Kabupaten Majene merupakan salah satu Daerah Otonom yang termasuk dalam 6 (enam) Kabupaten dan berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki topologi daratan rendah dan daratan tinggi. Berdasarkan bentuk wilayah Kabupaten sebagai wilayah daratan yang memanjang dari selatan ke utara di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Barat, tentunya akan berimplikasi terhadap kebijakan dan program pembangunan serta konsep penataan ruangnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan dan kegiatan pembangunan harus dapat diselaraskan dengan bentuk dan aksesibilitas kawasan terhadap pusat-pusat pengembangan. Tinjauan terhadap karakteristik wilayah merupakan langkah awal dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan.

Pada dasarnya wilayah Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap daerah sekitarnya ini dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene secara geografis terletak antara 20° 38' 45" - 30° 38' 15" Lintang Selatan dan antara 118° 45' 00" - 119° 4' 45" Bujur Timur. Luas wilayah

Kabupaten Majene adalah 947,84 Km² atau 5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat dan luas wilayah laut ± 13.124 Km² dengan panjang garis pantai ± 125 Km². Jarak Kabupaten Majene ke Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) Kurang lebih 146 km.



Gambar I.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Majene
Provinsi Sulawesi Barat





Adapun batas-batas Administrasi Daerah Kabupaten Majene sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 188.780 Jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Banggae sebesar 45.287 Jiwa per Km² dan Banggae Timur sebesar 33.958 Jiwa per Km². Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berada di Ibu Kota Kabupaten Majene. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Ulumanda sebesar 10.468 Jiwa per Km² dan Tubo Sendana sebesar 10.124 Jiwa per Km².

Adapun Jumlah Penduduk di Kabupaten Majene Tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Majene

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
			TOTAL
1	2	3	4
1	76.05.01	BANGGAE	46.316
2	76.05.01	BANGGAE TIMUR	34.865
3	76.05.01	PAMBOANG	25.750
4	76.05.01	SENDANA	26.279
5	76.05.01	TAMMERODO SENDANA	13.261
6	76.05.01	TUBO SENDANA	10.370
7	76.05.01	MALUNDA	21.163
8	76.05.01	ULUMANDA	10.776
JUMLAH			188.780

Sumber : Data Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Majene Tahun 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa / Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pemekaran Desa / Kelurahan, maka sejak tahun 2011 Kabupaten Majene mengalami pemekaran wilayah dari 40





(empat puluh) Desa / Kelurahan menjadi 82 (delapan puluh dua) Desa / Kelurahan. Sehingga secara Administratif Kabupaten Majene terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan, 62 (enam puluh dua) Desa.

Adapun Pembagian Administrasi, Luas Wilayah Kecamatan, Persentase Wilayah Kecamatan serta Nama Kelurahan dan Desa secara detail di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel I.2. Pembagian Administrasi, Luas Wilayah Kecamatan, Persentase Wilayah Kecamatan serta Nama Kelurahan dan Desa Kab. Majene

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Kelurahan	Desa	Ket.
1.	Banggae	25.15	2.65	Banggae	Palipi Soreang	6 Kelurahan, 2 Desa
				Baru	Pamboborang	
				Galung		
				Pangali-Ali		
				Rangas		
				Totoli		
2.	Banggae Timur	30.04	3.17	Baruga Dhua	Buttu Baruga	8 Kelurahan, 1 Desa
				Baruga		
				Baurung		
				Labuang		
				Labuang Utara		
				Lembang		
				Tande		
				Tande Timur		
3.	Pamboang	70.19	7.41	Lalampanua	Adolang	2 Kelurahan, 13 Desa
				Sirindu	Adolang Dhua	
					Bababulo	
					Bababulo Utara	
					Balombong	
					Banua Adolang	
					Betteng	
					Buttu Pamboang	
					Bonde	
					Bonde Utara	
					Pesuloang	
					Simbang	
					Tinambung	





No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	%	Kelurahan	Desa	Ket.
4.	Sendana	82.24	8.68	Mosso	Banua Sendana	2 Kelurahan, 14 Desa
				Mosso Dhua	Bukit Samang	
					Binanga	
					Lalattedong	
					Leppangan	
					Limboro Rambu-Rambu	
					Limbua	
					Paminggalan	
					Pundau	
					Puttada	
					Sendana	
					Tallubanua	
					Tallubanua Utara	
					Totolisi Sendana	
5.	Tammerodo Sendana	55.40	5.84		Awo	7 Desa
					Manyamba	
					Seppong	
					Tallambalao	
					Tammerodo	
					Tammerodo Utara	
					Ulidang	
6.	Tubo Sendana	41.17	4.34		Bonde-Bonde	7 Desa
					Onang	
					Onang Utara	
					Tubo	
					Tubo Poang	
					Tubo Tengah	
					Tubo Selatan	
7.	Malunda	187.65	19.80	Lamungang Batu	Bambangan	2 Kelurahan, 10 Desa
					Kayuangin	
				Malunda	Lombang	
					Lombang Timur	
					Lombong	
					Lombong Timur	



No.	Kecamatan	Luas (Km²)	%	Kelurahan	Desa	Ket.
					Maliaya	
					Mekkatta	
					Mekkatta Selatan	
					Salutahongan	
8.	Ulumanda	456	48.11		Kabiraan	8 Desa
					Panggalo	
					Popenga	
					Salutambung	
					Sambabo	
					Sulai	
					Tandeallo	
					Ulumanda	
Jumlah		947.84	100.00	20	62	

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Tabel I.3.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Majene

NO	OPD	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SEKRETARIAT DAERAH	78	36	114
2	SEKRETARIAT DPRD	37	15	52
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	31	21	52
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30	29	59
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	6	10	16
6	BADAN PERENCANAAN DAERAH	18	11	29
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	30	17	47
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	14	21
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	109	5	114
10	INSPEKTORAT	27	21	48
11	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	15	14	29
12	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	1087	2091	3178
13	DINAS KESEHATAN	149	656	805
14	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	115	346	461
15	RUMAH SAKIT PRATAMA SALUTAMBUNG	2	5	7
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46	21	67
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	26	15	41
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	18	13	31
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	23	39
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	14	19
21	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	27	13	40



22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	37	14	51
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30	24	54
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	13	18
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16	11	27
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19	27	46
27	DINAS PERHUBUNGAN	42	11	53
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9	21	30
29	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	87	62	149
30	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	23	8	31
31	DINAS SOSIAL	9	9	18
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12	17	29
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	97	8	105
34	KECAMATAN BANGGAE	37	19	56
35	KECAMATAN BANGGAE TIMUR	42	28	70
36	KECAMATAN PAMBOANG	27	9	36
37	KECAMATAN SENDANA	24	14	38
38	KECAMATAN TAMMERODO SENDANA	11	5	16
39	KECAMATAN TUBO SENDANA	14	7	21
40	KECAMATAN MALUNDA	25	12	37
41	KECAMATAN ULUMANDA	15	3	18
JUMLAH		2460	3712	6172

Sumber : Data BKPSDM Kab. Majene Tahun 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Adapun Realiasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan akhir Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 881.012.660.509.59 (data sebelum hasil Audit BPK) atau 97.21 % dari total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 906.226.956.217,-. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)	
		TARGET ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	116.958.226.043	101.787.645.525.59
2.	Pendapatan Transfer	789.268.730.174	779.225.014.984
3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	6.269.065.647	6.377.173.674,34
TOTAL		906.226.956.217	881.012.660.509.59

Sumber : Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majene Tahun 2025 (sebelum hasil Audit BPK)



1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Kendala atau permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius guna mewujudkan masyarakat Majene yang sejahtera, antara lain :

1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang dihadapi tiap negara. Kemiskinan juga dapat terjadi oleh karena dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif dan tidak seimbang. Ketidakseimbangan ekonomi memberikan gap antar masyarakat dan juga gap pendapatan antar daerah. Kemiskinan juga sering terpolarisasi oleh ada atau tidaknya pembangunan yang akan berimplikasi terhadap perubahan ekonomi di suatu wilayah.

Pada Tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Majene menunjukkan angka yang masih tinggi dengan Persentase penduduk miskin sebesar 13,64%. Angka tersebut menurun di Tahun 2025 menjadi sebesar 12, 78%, angka tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025 sebesar 13,19% Namun, masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Majene dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya multi dimensi seperti tidak mencukupinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sangat sulit yang disebabkan masih rendahnya pendidikan dan keterampilan, minimnya investasi yang mampu mengakomodir masyarakat miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar seperti rumah layak huni, jaminan kesehatan bagi orang miskin, akses pendidikan dan keterampilan serta tidak mencukupinya perlindungan sosial.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,3 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 4,1 persen. Pertumbuhan ini tidak jauh berbeda dari kondisi nasional dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen dan turun pada tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi barat pada tahun 2023 sebesar 5,25 persen dan turun pada tahun 2024 sebesar 4,76 persen. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi kabupaten Majene juga masih lebih baik dari provinsi Sulawesi Barat. Meskipun trend Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene lebih baik dari nasional maupun provinsi, akan tetapi laju

pertumbuhan ekonomi masih melambat pada kenaikan sebesar -22,64 persen.

Terdapat kecenderungan positif atas laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene, sehingga pada tahun 2026 terdapat optimisme bahwa Kabupaten Majene akan dapat terus bergerak menuju perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, prioritas pembangunan pada tahun 2026 yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:

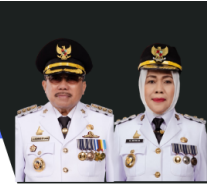
- Revitalisasi pusat-pusat perdagangan;
- Modernisasi sarana pertanian, kelautan dan perikanan;
- Modernisasi metode produksi, distribusi dan pemasaran pengelolaan SDA;
- Peningkatan cadangan pangan daerah;
- Penyusunan dan penerbitan regulasi pendukung peningkatan PAD, kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan; dan
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kebersihan secara terpadu.

3. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Majene menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, namun justru mengalami penurunan pada tahun 2025 dengan nilai 99,99. Penurunan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap tren positif yang sudah berjalan, mengingat penurunan yang terjadi sebesar 0,1 persen saja. Pada tahun 2021 sebesar 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana UHH mencapai 69,65 tahun, atau bertambah 0,39 tahun dari tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan UHH mencapai 70,06 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,41 tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024, ketika UHH Kabupaten Majene mencapai 70,39 tahun, naik 0,33 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Majene meningkat sebesar 1,35 tahun.

4. Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan-permasalahan terkait dengan belum optimalnya penataan tata laksana pemerintah daerah di Kabupaten Majene disebabkan beberapa hal sebagai berikut :



- Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Capaian Pemerintah Kabupaten Majene pada penilaian tata kelola pemerintahan oleh pemerintah pusat belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meski Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dapat dipertahankan pada opini WTP selama 8 tahun berturut-turut, namun penilaian lain seperti SAKIP (predikat B), LPPD (nilai 3,43), Reformasi Birokrasi (predikat CC) dan lain sebagainya masih perlu kerja keras untuk ditingkatkan capaiannya dengan harapan dengan hasil penilaian yang baik, maka pemerintahan di Kabupaten Majene dapat lebih akuntabel dan terkelola dengan baik dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat sesuai dengan kewenangannya

- Belum tersedianya pusat pelayanan publik

Pelayanan publik di Kabupaten Majene yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat tergambar pada survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada beberapa instansi publik yang dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten Majene pada tahun 2023 hanya menghasilkan capaian 76,44%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Majene masih memiliki ruang yang luas untuk ditingkatkan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat pada berbagai instansi dan fasilitas pelayanan publik yang masih kurang efektif dan efisien berakibat pada menurunnya kualitas pelayanan.

Pusat Pelayanan publik yang ada di Kabupaten Majene saat ini hanya terdapat pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dengan sarana prasarana, SDM dan jenis pelayanan yang masih terbatas. Pada Tahun 2017, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik mulai menggaungkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di tengah-tengah masyarakat. Namun sampai saat ini Kabupaten Majene belum memiliki MPP yang disebut-sebut sebagai bentuk pelayanan publik terpadu generasi ketiga. Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga diharapkan dapat memayungi fungsi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Keberadaan MPP dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah**• Visi Kepala Daerah**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Pada periode 2020-2025, Visi Majene adalah “Majene Unggul, Mandiri, dan Religius”, namun untuk periode 2025-2029 dilakukan penyesuaian visi yang diperlukan karena visi yang sama antar periode menunjukkan stagnasi pembangunan, sehingga dapat menghambat kemajuan daerah dalam merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan dinamika ekonomi, serta menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat akan inovasi dan peningkatan kualitas hidup pada arahan visi sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Majene Tahun 2025-2029, yaitu:

“Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Majene Maju:

Bermakna bahwa Pemerintah Daerah akan menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan ASN yang profesional dan akuntabel.

Majene Mandiri :

Bermakna bahwa Pemerintah Daerah akan mewujudkan kemandirian ekonomi Kabupaten Majene melalui hilirisasi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif.

Majene Berbudaya :

Bermakna bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen membangun budaya masyarakat dan menjadikan nilai religi sebagai dasar perilaku, didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal untuk mewujudkan harmoni sosial.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Awalnya misi atau janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat tahapan Pemilihan Kepala Daerah disusun berdasarkan pada akronim inisial nama pasangan Bupati dan

Wakil Bupati terpilih yakni AST-RITA, dengan rumusan sebagai berikut:

- Aman** Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan ketentraman serta melestarikan budaya masyarakat yang malaqbi’.
- Sejahtera** Mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkualitas dan sejahtera dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan investasi yang bertumpu pada potensi lokal dan regional, ramah lingkungan dan berkesinambungan
- Terarah** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien melalui peningkatan mutu birokrasi dengan menerapkan e-government yang holistik dan terintegrasi disegala sektor pelayanan publik.
- Responsif** Mewujudkan akselerasi perbaikan taraf hidup masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam mendukung kemandirian masyarakat.
- Inovatif** Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan serta peningkatan keterampilan dan kewirausahaan untuk menopang perekonomian daerah.
- Terintegrasi** Mewujudkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi melalui perencanaan wilayah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
- Agromarine** Mewujudkan pengembangan wilayah yang berbasis industri melalui pengelolaan sumber daya pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata.

Penjelasan 7 Misi diatas merupakan penjabaran dari janji politis yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat Kabupaten Majene pada saat mengikuti tahapan Pilkada yang lalu. Dalam rangka penyempurnaan rangkaian redaksi misi di atas, maka dilakukan proses transformasi menjadi bahasa misi dan *adaptable* terhadap kaidah-kaidah perencanaan yang harus patuh pada regulasi dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Setelah mengalami transformasi dan penyesuaian bahasa Misi, maka misi sebagai panduan langkah taktis untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Majene Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
2. Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal;
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.

Tabel I.5. Penjelasan Visi

Keterkaitan antara Visi dan Misi pada Penjelasan Misi
RPJMD Kab Majene 2025 – 2029

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Penjelasan Keterkaitan Misi dengan Visi
Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya	Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	• Pengelolaan SDA dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk menciptakan peluang kerja bagi penduduk lokal, sehingga masyarakat Majene lebih terampil dan berdaya saing. (Maju) • Optimalisasi SDA melalui hilirisasi dan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan untuk memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekonomi daerah. (Mandiri)
	Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	• Akses pendidikan merata baik formal maupun non- formal, serta layanan kesehatan berkualitas untuk menciptakan individu yang kompetitif dan produktif. (Mandiri) • Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai religius untuk membentuk karakter yang beriman dengan melestarikan budaya yang didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal dalam kehidupan sosial untuk menciptakan kesejahteraan. (Berbudaya)
	Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	• Perekonomian daerah yang mendukung pemberdayaan wirausaha berbasis kearifan lokal. (Mandiri) • Identitas budaya daerah yang terjaga melalui revitalisasi situs-situs bersejarah dan tradisi lokal. (Berbudaya)
	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	• Pemerintahan yang profesional dan transparan dengan meningkatkan kapasitas aparatur untuk menghasilkan pelayanan publik yang kompeten dan responsif bagi masyarakat Majene. (Maju) • Tata kelola yang berintegritas untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendukung pengembangan ekonomi lokal sehingga sumber daya daerah dapat dikelola secara mandiri dan efisien. (Mandiri) • Perwujudan pemerintahan yang bersih dengan mencerminkan karakter religius diperkuat dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal demi terciptanya pelayanan publik yang berintegritas. (Berbudaya)

Kemudian untuk mencapai kualitas perencanaan yang baik, patuh pada kaidah perencanaan harus memiliki benang merah pada semua tingkatan perencanaan mulai dari Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN) dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat, maka

RPJMD Kabupaten Majene harus terkoneksi langsung dengan dua dokumen tersebut dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Majene. Sehingga keselarasan perencanaan dan keterpaduan dalam penyusunan program kerja mengarah pada cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Keselarasan hubungan antara Visi dan Misi RPJPD Kab. Majene 2025 - 2045 dengan Visi dan Misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.6

**Matriks Keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD
Kab. Majene Periode 2025 – 2029 dengan Visi dan Misi
RPJPD Kab. Majene Periode 2025 – 2045**

Visi RPJMD 2025 – 2029	Visi RPJPD 2025 - 2045
Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya	Majene Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
Pokok Visi Majene Maju Menjadikan Kab. Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan ASN yang profesional dan akuntabel.	Pokok Visi Majene Maju Terwujudnya kabupaten Majene yang Maju dari aspek kependudukan, tata kelola Pemerintahan, Aspek Ekonomi, Aspek Pembangunan Infrastruktur dan aspek Budaya. Aspek kependudukan yaitu meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, unggul serta mampu adaptif dengan perkembangan IPTEK agar mampu melakukan inovasi-inovasi di sektor produktif
Pokok Visi Majene Berbudaya Membangun budaya masyarakat dan menjadikan nilai religi sebagai dasar perilaku, didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal untuk mewujudkan harmoni sosial	
Pokok Visi Majene Mandiri Mewujudkan kemandirian ekonomi Kab. Majene melalui hilirisasi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif	Pokok Visi Majene Sejahtera Merupakan kondisi dimana Masyarakat Kabupaten Majene terpenuhi segala kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan; terpenuhinya layanan pendidikan, kesehatan dan sosial; tersedianya lapangan pekerjaan; meningkatnya pendapatan masyarakat; memperoleh kehidupan yang aman dan tentram
	Pokok Visi Majene Berkelanjutan Pembangunan di Kabupaten Majene mengedepankan prinsip Pembangunan Berkelanjutan dengan memperhatikan peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan tujuan Pembangunan yang telah tertuang dalam SDGs (Sustainable Development Goals).



Misi RPJMD 2025 – 2029	Misi RPJPD 2025 - 2045
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berdaya Saing
	4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan
	7. Membangun Infrastruktur Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
2. Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Mewujudkan Transformasi Sosial
	4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Mewujudkan Transformasi Sosial
	5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Peningkatan Profesionalisme, Transparansi, Akuntabilitas dan Integritas
	8. Mewujudkan Kesisinambungan Pembangunan Daerah

• **Misi Kepala Daerah**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025–2029 dapat dilihat dalam matriks berikut:





Tabel I.6.

Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Visi:
“Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya”

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi
			Terjaganya stabilitas perekonomian daerah	Laju Inflasi
			Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat	Pendapatan Per Kapita
			Optimalnya hilirisasi pengelolaan SDA	Persentase Kontribusi SDA Unggulan & Industri Pengolahan terhadap Total PDRB
	Meningkatkan kualitas infrastuktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Terselenggaranya konektivitas antar kawasan strategis	Indeks Konektivitas Wilayah
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	pendukung perekonomian daerah		Mewujudkan Infrastruktur Digital yang Andal dan Mendorong Kapasitas Masyarakat Digital untuk Pemanfaatan Ekonomi Daerah.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Kontribusi Penurunan emisi GRK kumulatif
			Meningkatkan Pengelolaan Persampahan yang Efektif, Terpadu, dan Berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah
				Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup
				Tingkat Prevalensi Stunting

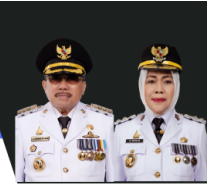




			Terserapnya tenaga kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Meningkatkan taraf hidup masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Menurunnya kesenjangan sosial	Indeks Gini
			Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	Menguatkan identitas kebudayaan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Terintegrasinya nilai budaya, religi dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Meningkatnya Pelestarian dan Pemanfaatan Warisan Budaya Daerah	Persentase Usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang di dafrakan
			Meningkatnya Perlindungan, Pelestarian, dan Akses Publik terhadap Cagar Budaya Daerah	Persentase Benda, Situs Cagar Budaya yang di Lestarikan & Dikembangkan
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Berintegrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, didorong dengan optimalisasi kualitas pengelolaan keuangan daerah dan digitalisasi birokrasi	Nilai SAKIP
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
				Nilai SPBE
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Penyelenggara n Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penetapan indikator tujuan dan sasaran menjadi elemen kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. RPJMD menyajikan kerangka indikator yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap tujuan strategis dapat diukur secara jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Indikator-indikator ini disusun berdasarkan metode pengumpulan data yang valid dan andal, dengan memanfaatkan capaian data 5 tahun sebelumnya sebagai dasar untuk





memproyeksikan target 5 tahun ke depan. Proyeksi ini memungkinkan perencanaan yang realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan tren perkembangan, tantangan, serta potensi daerah, sehingga setiap indikator dapat mencerminkan dampak pembangunan yang signifikan.

Tujuan dalam RPJMD mencerminkan arah pembangunan jangka menengah, sementara sasaran merupakan langkah-langkah konkret yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Indikator tujuan dan sasaran disusun dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan berfokus pada indikator dampak (*impact indicators*) yang memiliki pengaruh luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator ini dirancang agar keberhasilannya bergantung pada pencapaian indikator pendukung di level perangkat daerah, yang diolah dari data yang dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya divalidasi serta diolah oleh lembaga vertikal, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau instansi terkait lainnya. Sumber data dari OPD daerah ini diolah untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keselarasan dengan standar nasional, sehingga menghasilkan indikator yang kredibel dan representatif.

Penyusunan indikator tujuan dan sasaran juga mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah, tantangan global, serta aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Data historis dari 5 tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi pola capaian dan memproyeksikan target yang realistis namun ambisius untuk 5 tahun ke depan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode yang terstandar, seperti survei, laporan rutin OPD, dan integrasi data lintas sektor, yang kemudian diolah oleh lembaga vertikal untuk menjamin objektivitas. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, indikator dampak ini tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan daerah berorientasi pada hasil yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD Kabupaten Majene dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, hal ini menjadi salah satu prasyarat mutlak dalam perencanaan daerah sebagai bagian dari region Sulawesi Barat, dalam rangka melahirkan perencanaan yang terkoneksi langsung, selaras dengan harapan melahirkan keterpaduan dan harmoni dalam proses-proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene maupun dalam Wilayah Pemerintahan Sulawesi Barat secara luas.



**Matriks Keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD
Kab. Majene Periode 2025 – 2029 dengan
Visi dan Misi RPJMD Prov. Sulawesi Barat Periode 2025 – 2029**

Visi RPJMD 2025 – 2029	Visi RPJMD Sulbar 2025 – 2029
Majene Maju, Mandiri dan Berbudaya	Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera
Pokok Visi Majene Maju Menjadikan Kab. Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan SDM yang berdaya saing tinggi dengan dukungan tata kelola pemerintahan dan ASN yang profesional dan akuntabel	Pokok Visi Sulawesi Barat Maju Maju dimaknakan sebagai kondisi dimana Sulawesi Barat mencapai kemajuan dalam berbagai aspek, yang mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Maju juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, inovatif dalam berbagai sektor, dan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan
Pokok Visi Majene Mandiri Mewujudkan kemandirian ekonomi Kab. Majene melalui hilirisasi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif	Pokok Visi Sulawesi Barat Sejahtera Sejahtera dimaknakan sebagai kondisi dimana masyarakat Sulawesi Barat hidup dalam kesejahteraan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta berkurangnya kesenjangan distribusi pendapatan secara signifikan antar kelompok masyarakat secara keseluruhan. Sejahtera juga dimaknakan sebagai kondisi dimana sumberdaya manusia Sulawesi Barat benar-benar berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mengangkat taraf hidup
Pokok Visi Majene Berbudaya Membangun budaya masyarakat dan menjadikan nilai religi sebagai dasar perilaku, didukung oleh nilai luhur dan kearifan lokal untuk mewujudkan harmoni sosial	

Misi RPJMD 2025 – 2029	Misi RPJMD Sulbar 2025 – 2029
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pemantapan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 4. Membangun Infrastruktur, Konektivitas dan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Upaya Pengembangan SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	2. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berkarakter
3. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya, Religi dan Kearifan Lokal	3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berkarakter
4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	5. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas



d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

Tabel I.10 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit
Pengadaan Mebel Sekolah	-	-
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	172 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	172 Satuan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	172 Satuan Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3 (Kegiatan) Orang
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1 Orang
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6 Kegiatan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	23 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	37 Satuan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	38 Satuan Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12 Unit
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2500 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	600 Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	7 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	-
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target





Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	60 Peserta Didik
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15 Orang
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 (Kegiatan) Satuan Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	PKBM Satuan Pendidikan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200 Orang
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	300 Peserta Didik
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	350 Orang
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	-
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN	-	-



OLAHRAGA		
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	200 Orang
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Organisasi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	200 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	41 Unit
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	20 Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang
pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	2 Dokumen
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	12 Dokumen
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Laporan
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan
Dinas Kesehatan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Sarana kesehatan di Fasyankes yang memenuhi standar	100 %



Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	20 Unit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Unit
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	19222 Keluarga
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	11 Paket
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% Fasyankes dasar dan rujukan yang rutin melakukan perbaikan mutu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang Melakukan Pengendalian PTM dan Penyakit Menular Lainnya Persentase keluarga yang dibina dan meningkat kemandiriannya Persentase serapan anggaran yang dialokasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan	100 % 100 % 65 % 98 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3532 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3781 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3903 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10344 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5332 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59633 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5086 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7845 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan	1492 Orang





Melitus	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	204 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1739 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	802 Orang
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	204 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	2 Unit
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1739 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen



Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	370 Orang
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	80 Orang
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	79 Unit
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	-	-



KESEHATAN		
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen
Puskesmas Banggae I		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan	100 %
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar	100 %
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	428 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	409 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2587 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	378 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	864 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	378 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara	Jumlah Dokumen Penerapan Pengelolaan data dan	12 dokumen



Terintegrasi	Sistem informasi kesehatan berbasis aplikasi	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen
Puskesmas Banggae II		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	276 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	265 Orang
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4536 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	325 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	742 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen
Puskesmas Totoli		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	511 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3900 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	459 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	621 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	459 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	621 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu	12 Dokumen



	dan anak	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen
Puskesmas Lembang		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	395 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	377 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2769 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	358 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	483 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	483 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen



Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen
Puskesmas Pamboang		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	577 Orang Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	556 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4487 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	470 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	636 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 Dokumen
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	470 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	548 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		



Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen
Puskesmas Sendana I		
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3066 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	481 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	646 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48 Dokumen
Puskesmas Sendana II		





URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	203 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1703 Orang
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	189 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	256 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	189 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	256 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen
NON URUSAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja



Puskesmas Tammerodo		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	362 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	315 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	330 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	248 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	334 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen
Puskesmas Malunda		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-

DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	473 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	439 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4537 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	394 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	572 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 Orang
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dokumen
Puskesmas Ulumanda		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-

DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	161 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1226 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	136 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	136 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen
Puskesmas Salutambung		
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja



PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	734 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	70 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	93 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan perkuatan tebing dan bangunan pengaman pantai dalam kondisi baik	89,62 %
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,666 KM





Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1,515 KM
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,722 KM
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0 KM
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	79 Titik
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,745 KM
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,025 KM
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM/ jaringan perpipaan terhadap jumlah rumah tangga di seluruh kabupaten	65,82 %
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	65,82 %
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 Dokumen
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500 SR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi	85 %
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	85 %
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	200 Rumah Tangga
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Proporsi drainase kabupaten dalam kondisi baik	96,22 %
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Persentase saluran drainase yang dibangun/direhab	96,22 %





Kabupaten/Kota		
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	4351 M
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	4937 Meter
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	0 Dokumen
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	0 Rumah Tangga
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	100 %
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten	100 %
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	37 Bangunan Gedung
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 Dokumen
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	0 Dokumen
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	100 %
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	56,33 %
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan	56,33 %
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,649 KM
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	18,938 KM
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	4,793 KM
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0 Jembatan
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	621,20 KM
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5,071 KM
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,166 KM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTR	100 %
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	100 %
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen





Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0 Laporan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	100 %
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0 Layanan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	100 %
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0 Kasus
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	0 Kasus
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	100 %
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3 Dokumen
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	0 Dokumen
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	1 Orang
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	40 Unit Rumah
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	10 Dokumen
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %





Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	6 Laporan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani terhadap total luas permukiman kumuh seluruh kabupaten	100 %
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 \$Sepuluh) Ha	100 %
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	100 Dokumen
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	5 Dokumen
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang dilengkapi PSU	80 %
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100 %
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	16 Dokumen
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Berita Acara
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	55 %
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tanah milik Masyarakat yang terfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat	100 %
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Dokumen
Satuan Polisi Pamong Praja		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN		



DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82 Dokumen
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Kasus Pelanggaran Perda/Perbup	100 %
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan SDM Satpol PP dalam Karier PPNS	80 %
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu)	1 Dokumen



	tahun	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 Kegiatan
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0 Unit
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	300 Orang
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	8 Kawasan
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0 Dokumen
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan,	10 Lembaga
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
	perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap	1 Dokumen





	Tahunnya	
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200 Orang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	150 Orang
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	8 Desa/Kelurahan
Dinas Sosial		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pemberdayaan Sosial Persentase pembinaan PSKS	100 % 100 Persen
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jum sub Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerahkab/Kota	5 Kegiatan
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Program Rehabilitasi Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial	100 % 100 Persen
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	12 Kegiatan
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	7 Kegiatan
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan	100 Orang





Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
	Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 % 100 Persen
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	3 Kegiatan
Rujukan Anak-Anak Terlantar	-	-
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1000 Orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Bencana	100 % 100 Persen
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	5 Kegiatan
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kab/Kota	2 Kegiatan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	100 %
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pelaksanaan perencanaan tenaga kerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga kerja	100 Persen 1 Dokumen
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah sub kegiatan dokumen perencanaan tenaga kerja	2 Item
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK	10 Orang





	Mikro	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat Jumlah angkatan Kerja	100 % 131421 Jiwa
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah sub kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	2 item
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	150 Lembaga
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	8 Perusahaan
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	22 Dokumen
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan pencari kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100 % 80 Persen
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Pelayanan antar kerja di Kabupaten/Kota	8 item
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	175 Orang
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	8 Orang
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Perlingdungan PMI (Pra dan purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	1 item
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	175 Orang
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase konflik ketenagakerjaan yang ditangani Persentase Perusahaan yang terdaftar	100 % 80 Persen
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	1 %
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	8 Laporan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1 item



Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 Perkara
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentasi Perencanaan Kawasan Trasmigrasi Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi	100 Persen 1 Dokumen
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah sub kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	3 Dokumen
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigrasi Umum Persentasi Kawasan Transmigrasi yang di Bangun	100 % 80 Persen
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota	3 item
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen
Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	35 Orang
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase perangkat daerah yang responsif gender	42 % 72 %
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen



Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	40 Orang
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	40 Orang
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Organisasi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	pERSENTASE Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	21 Lembaga
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1569 Orang
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100 %
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %





Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga dan anak yang terlayani	100 %
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	21 Lembaga
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan disajikan sesuai standar	50 %
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak Persentase Pemenuhan Hak Anak	35 % 80 %





Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 Organisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditangani	100 %
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	40 Orang
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan





Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang
koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen
Dinas Ketahanan Pangan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-	-
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100 Persen 83.40 Skor 90.40 %
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan	100 %
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Ton
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan Persentase Desa Rawan Pangan	2,44 Persen 3,66 %
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Pemenuhan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100 %
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen





Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	-
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah ditujukan selain mengejar pertumbuhan ekonomi juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sedangkan urusan untuk pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bermakna bahwa didalam urusan pemerintahan wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan yang wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan Pendidikan;
- 2) Urusan Kesehatan;
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Urusan Ketentraman ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Urusan Sosial.

Standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam konstektual sebagai norma, standar prosedur dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar berhak diperoleh setiapwarga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar,kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah . oleh karena itu baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana

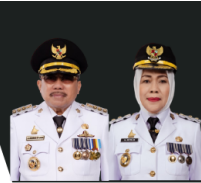




konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene menyusun rencana pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan/ keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan kedalam rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja OPD). Kebijakan Anggaran Umum (KUA), Rencana Kerja dan rencana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.





BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator Kinerja Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial, dimana capaian kinerja dari indikator makro tersebut merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak terkait lainnya dalam Pembangunan Nasional. Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Majene

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja 2025
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73.25%	74.15%	1.23%
2.	Persentase Penduduk Miskin	13.64%	12.78%	-6.30%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.19%	3.74%	-10.74%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5.3%	4.1%	-22.64%
5.	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku	6.4%	7.05%	10.16%
6.	Ketimpangan Pendapatan(Gini Ratio)	0.33%	0.31%	-6.06%

Sumber : Badan Pusat Statistika Tahun 2025

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh Pendapatan, Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Majene tercatat 74,15%. Angka ini tumbuh sebesar 1,23 persen dibanding keadaan tahun 2024.

2. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100





kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene pada tahun 2025 tercatat 12,78% yang menandakan bahwa laju kinerja pada tahun 2025 sebesar -6,30%.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tinggi rendahnya angka pengangguran disuatu daerah dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kabupaten Majene angka TPT pada tahun 2025 adalah 3,74%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data lima tahun terakhir, kondisi perekonomian di Kabupaten Majene relatif mengalami perlambatan. Perlambatan ini lebih diakibatkan oleh tekanan ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas harga di dalam negeri dan berimbas pada perlambatan kinerja perekonomian daerah di Kabupaten Majene.

Di tahun 2024 tumbuh 5,3%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025. Untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,1%, dengan laju kinerja pada tahun 2025 .

5. PDRB per kapita Atas Harga Berlaku (ADHB)

PDRB per kapita di Kabupaten Majene Tahun 2025 tercatat sebesar 7,05 persen per tahun, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 6,4 persen, sehingga mengalami laju kinerja sebesar 10,16 persen.

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Majene Tahun 2025 tercatat sebesar 0,31% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 0,33% dengan laju kinerja mencapai -6,06%.



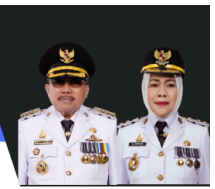


Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data / informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

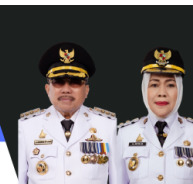




2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Per Kategori Urusan

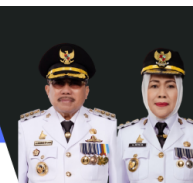
	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
1.	PENDIDIKAN	1) Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini ----- x 100 % Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	6416 ----- x 100 % = 81.73% 7850	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	
		2) Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	32193 ----- x 100 % = 95.10 % 33849	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor	
		3) Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	664 ----- x 100 % = 2.43% 27262	Kementerian Agama Kabupaten Majene	
		4) Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik ----- x 100 % Jumlah seluruh toilet	381 ----- x 100 % = 59,07 % 645		
		5) Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik ----- ----- x 100 % Jumlah ruang kelas	781 ----- x 100 % = 54,20 % 1441		





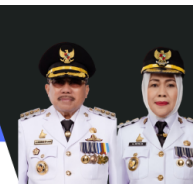
No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
2. Kesehatan								
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	9	3180	0.2830189	%	DINAS KESEHATAN
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	6176	7599	81.2738518	%	
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	950	950	100	%	
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	369	369	100	%	
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	3740	3740	100	%	
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3849	4198	91.6865174	%	
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	3632	10651	34.1000845	%	





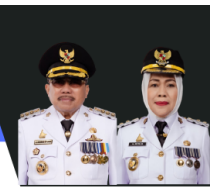
No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2240	3055	73.3224223	%	DINAS KESEHATAN
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2506	3055	82.0294599	%	
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3042	3042	100	%	
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	5517	12400	44.4919355	%	
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	26574	33041	80.4273478	%	
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	97319	120100	81.0316403	%	
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	11202	15589	71.8583617	%	





No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
3. PUPR								
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1064	1534	69.3611473	%	DINAS PUPR
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	0	1	-	%	
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	194.75	625.21	31.1495338	%	
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	38753	54028	71.7276227	%	
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	38579	54028	71.4055675	%	
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	4380	94784	4.6210331	%	
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1731	94784	1.8262576	%	

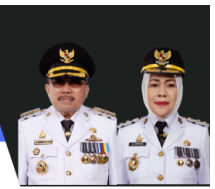




1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	7280	12269	59.3365392	%	
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1	1	100	%	
1.c.9	Persentase tenaga operator/tekniisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	0	1	-	%	

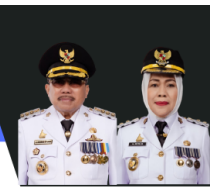
No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
4. PERKIMTAN								
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	32	4089	0.7825874	%	DINAS PERKIMTAN
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	0	1860	-	%	
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	0	11621	-	%	
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	2158	2158	100	%	





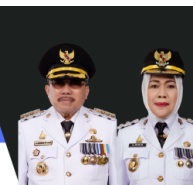
No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
5. TRANTIBUMLINMAS								
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	1	3	33.3333333	%	DINAS SATPOL PP
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	6	6	100	%	
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	18	18	100	%	
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	165118	165118	100	%	
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	10	10	100	%	BPBD
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	23	23	100	%	





No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
6. SOSIAL								
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	350	350	100	%	DINAS SOSIAL
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	88	88	100	-	
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	143	143	100	-	
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	118	118	100	-	
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	250	250	100	-	
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	13445	15202	88.4423102	-	

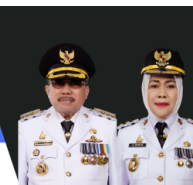




URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

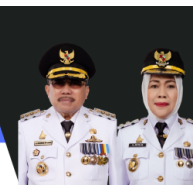
No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
7. TENAGA KERJA								
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	0	1	-	%	DINAS TENAGA KERJA
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	98	413	23.7288136	%	
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2220	10434	21.2765957	%	
8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	36	36	100	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	15	15	100	%	
9. PANGAN								
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	12.31	20	61.55	%	DINAS KETAHANAN PANGAN





No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
10. PERTANAHAN								
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	862772	5153895	16.7401936	%	BIDANG PERTANAHAN
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	0	1	-	%	
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	0	1	-	%	
11. LINGKUNGAN HIDUP								
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	4	5	80	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	10276.36	34971.75	29.3847463	%	
12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	64275	66394	96.8084465	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	27202	62509	43.5169336	%	
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	0	2	-	%	





2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	126752	130813	96.8955685	%	
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	1.343	1.343	100	%	
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	1.260	1.260	-	%	
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	2	2	100	%	

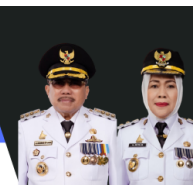
13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	0	18	-	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	5	39	12.8205128	%	
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	7	7	100	%	

14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2.55	2.55	100	%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	13022	26208	49.6871184	%	
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	2719	26140	10.4016832	%	





No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
15. PERHUBUNGAN								
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	-	0.66	-	0.66	Rasio	DINAS PERHUBUNGAN
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0.85	-	0.85	Rasio	
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	0	1	-	%	
16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	38	40	95	%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	17	20	85	%	
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	64724	193320	33.48024	%	
17. KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	1698028990	16164712	5.0454158	%	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	2324	18510	12.555375	%	
18. PENANAMAN MODAL DAN PTSP								
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	2.89869	5.5168	-47.456981	%	DPM-PTSP
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan	2.89869E	4.5	64.415367	%	

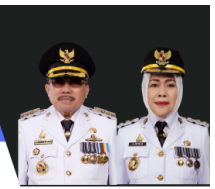




			Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

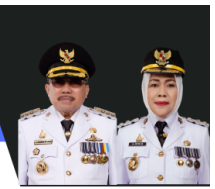
No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
19. PEMUDA DAN OLAHRAGA								
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	400	400	100	%	BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	200	50.725	0,39	-	
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	4	965	0.4145078	%	
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	0	1	-	%	
20. STATISTIK DAN PERSANDIAN								
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	0	1	-	%	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	0	918	-	%	





No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
21. KEBUDAYAAN								
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	6	222	2.7027027	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	12865	5407	137.93231	%	
22. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	59.94	-	59.94	Nilai	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	2.13	-	2.13	Nilai	
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	3.151	-	3.151	%	

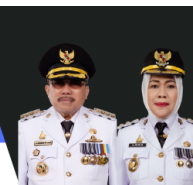




URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

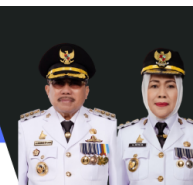
No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
23. PERIKANAN								
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	10385.15	11423.67	90.9090511	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	-	-	-	Kg / Kap / Tahun	
24. PARIWISATA								
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	9544100000	2.89869	3.2925546	%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	13	1	1200	%	
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	56366	32648	72.6476354	%	
25. PERTANIAN								
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	22798	28754	-20.7136398	%	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	243558.34	233106.88	4.4835485	%	
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	704.66	429.89	63.9163507	%	
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	38.51	947.84	4.062922	%	





No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
26. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	100	1980	5.0505051	%	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	0	-	-	%	
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	1	2812	0.0355619	%	
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	2812	2111	33.2070109	%	
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	0	1	-	%	

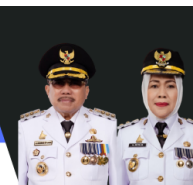




2.2.2 IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
27. PERENCANAAN								
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17	17	100	4.a.1	BADAN PERENCANAAN DAERAH
28. KEUANGAN								
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	159.026.779.168	864.014.832.041,78	18.41	%	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	101.787.645.525,59	881.012.660.509,59	11.55	%	
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	440.031.011.264,78	864.014.832.041,78	50.93	%	
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	183.826.186.707,69	864.014.832.041,78	21.28	%	
29. KEPEGAWAIAN								
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1216	1601	75.95	%	BKPSDM
30. INOVASI								
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	4	20	20	%	BADAN INOVASI DAERAH





No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data
31. PENGAWASAN								
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3.2	- 3.2		Nilai	INSPEKTORAT
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3	- 3		Nilai	
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	2.8	- 2.8		Nilai	
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	99	99	100	%	
32. PENGADAAN								
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	22.22	- 22.22		Poin	BAGIAN UPBJ
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	12.31	- 12.31		Poin	
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	27	- 27		Poin	
33. HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH								
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	- 1		1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	BKAD
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	7	13	53.8461538	%	BAGIAN HUKUM
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	86.96	- 86.96		Nilai	BAGIAN ORTALA





2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah,serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Adapun Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Misi	Tujuan	Indikator	Target 2025
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	74,17 %
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	71 (BB)
Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan	Pendapatan Perkapita	30,03 Juta
Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis	Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat	Indeks Kesalihan Sosial	78 %

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Tahun 2025





Tabel 2.3. Target Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2025
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif				
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Layanan pendidikan	1.	Rata-Rata Lama Sekolah	9,73 Tahun
		2.	Harapan Lama Sekolah	13,89 Tahun
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1.	Angka Harapan Hidup	70,75 Tahun
		2.	Prevalensi Stunting	32,68 %
3.	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	1.	Indeks Pembangunan Gender	96,7 %
		2.	Indeks Perlindungan Anak	72,6 %
4.	Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	1.	Persentase Penduduk Miskin	13,19 %
		2 .	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,06 %
		3.	Gini Ratio	0,34 %
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel				
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1.	Poin Predikat SAKIP	63,5 B Predikat
		2.	Opini BPK	WTP Predikat
		3.	Nilai LPPD	3,60
6.	Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 (Baik)
7.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	2.	Tingkat maturitas SPBE	3,0 (Baik)
8.	Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	1.	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	90 %
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan				
9.	Meningkatnya kontribusi Pengelolaan SDA dalam Perekonomian Daerah	1..	Pertumbuhan Ekonomi	6,46 &
		2.	Laju Inflasi (yoy)	1,79 %
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	78,15 %
11.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,33 %
Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis				
12.	Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	1.	Angka Kriminalitas	190 Kasus

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Tahun 2025

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Adapun Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Misi	Tujuan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	74,17%	74,15 %	99.99 %
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	71, (BB)	61,53 Nilai Sebelum Sanggah	86,66 (B)
Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Pendapatan Perkapita	30,03 % Juta	Belum ada nilai	Belum ada nilai
Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis	Meningkatkan kesalihan sosial Masyarakat	Indeks Kesalihan Sosial	78 %	Belum ada nilai	Belum ada nilai

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Tahun 2025

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif						
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Layanan pendidikan	1.	Rata-Rata Sekolah Lama	9,73 Tahun	9,68 %	99.49 %
		2.	Harapan Sekolah Lama	13.89 Tahun	13,84 %	99.64 %
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	1.	Angka Harapan Hidup	70.75 Tahun	70.74 %	99.99 %
		2.	Prevalensi Stunting	32.68 %	34.1 %	104.35 %
3.	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	1.	Indeks Pembangunan Gender	96.7 %	96.78 %	98.41 %
		2.	Indeks Perlindungan Anak	57,96 %	57,17 %	122.22 %
4.	Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga perdesaan	1.	Persentase Penduduk Miskin	13.19 %	12.98 %	92.35 %
		2 .	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.06 %	3.74 %	122.22 %
		3.	Gini Ratio	0,34 %	0,314 %	92.35 %
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel						
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1.	Poin Predikat SAKIP	63.5 BB	60.46 B	100.51 %
		2.	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		3.	Nilai LPPD	3,60	Belum ada Nilai	-
6.	Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 (Baik)	86,0	100.361 %
7.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	2.	Tingkat maturitas SPBE	3,0	3,04 (Baik)	100.014
8.	Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	1.	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	90		95.83
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan						
9.	Meningkatnya kontribusi Pengelolaan SDA dalam Perekonomian Daerah	1..	Pertumbuhan Ekonomi	6,46 %	4.17	64.55 %
		2.	Laju Inflasi (yoy)	1,79%	1,51 %	84.36 %
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	78,15 %	64.22 %	82.18 %
11.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80.33 %	79.68 %	99.19 %
Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis						
12.	Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara		Angka Kriminalitas	190 Kasus	157 Kasus	82.63 %

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Tahun 2025

2.3.3 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Adapun Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6. Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	9,21 Tahun	9,28	100,76 %	9,39 Tahun	9,64	102,66	9.73	9.68	99.49
2.	Harapan Lama Sekolah	Persen	14,26 Tahun	13,71 Tahun	96,14 %	14,4 Tahun	13,72	95,28	13.89	13.84	99.64
3.	Angka Harapan Hidup	Persen	62,23	62,56	100,53 %	62,45 Tahun	62,895 Tahun	100,70 Tahun	70.75	70.74	99.99
4.	Prevalensi Stunting	Persen	23,08	34, 56	149,74 %	17,99 &	30,51	30,41 %	32.68	34.1	104.35
5.	Indeks Pembangunan Gender	Persen	95,1	94,19	99,04 %	95,56 %	94,68 %	99,08 %	96.7	96.78	100.08
6.	Indeks Perlindungan Anak	Persen	70,5	52,70 %	74,75 %	58,62 %	55,16 %	94,08 %	57,96	57,17	98.64
7.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12	14,54 %	Belum Mencapai Target	11,58	13,64 %	82,21 %	13.19	12.98	98.41
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,70 %	2,64	Melebihi Target	3,2 %	4,19 %	69,06 %	3.06	3.74	122.22
9	Gini Ratio	Persen	0,336	0,34	98,81 %	0,329 Poin	0,33 Poin	99,70	0.34	0.314	92.35
10.	Poin Predikat SAKIP	Predikat	BB	B	88 %	BB	B	88	63.5 B	60.46 B	95.21
11	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100 %	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
12	Nilai LPPD	Persen	3,57	2,31	64,74 %	3,57	Belum ada Nilai	Belum ada Nilai	3,60	Belum ada Nilai	Belum ada Nilai
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	82,00	84,60	100,3 %	85	86	101	86 Baik	84.60	98.37 %
14	Tingkat maturitas SPBE	Predikat	3	2,56	85,33 %	2,8	3,04	Baik	3,0 Baik	Belum ada Nilai	Belum ada Nilai
15	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	Persen	70	100	142,85 %	80 %	Belum ada Nilai	Belum ada Nilai	90	Belum ada Nilai	Belum ada Nilai
16.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5% - 6,25%	5,28	Belum Mencapai Target	6,37 %	5,3 %	83,20 %	6,46	4.17	64.55
17	Laju Inflasi (yoy)	Persen	2,09	2,59	Belum Mencapai Target	1,94 %	194 %	100 %	1,79	1.51	84.36
18.	Indeks Infrastruktur Wilayah	Persen	73,2	56,72	77,48 %	76,45 %	58,32 %	76,29 %	78,15	64.22	82.18
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	70,41	75,08	106,63 %	70,,86 Poin	78,26 Poin	110,44	80.33	79.68	99.19
20	Angka Kriminalitas	Kasus	220	196	Melebihi Target	200	185	107,50	190	157	82.63

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Tahun 2025

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Adapun Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7. Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dibandingkan dengan Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022

Indikator Makro	Nasional			Kabupaten Majene		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,	- 2,42	-44,40 %	6,16	-1,38	-22,40 %
Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	72,31	72,29	99,97 %	80	67,29	84,11 %
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,5 - 9,5	9,8	91,11 %	12,41	15,13	121,91 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 - 5,2	6,49	71,20 %	4,15	2,19	52,77 %

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Tahun 2025



2.3.5 Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Adapun Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisai	Capaian
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif					
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan Layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	39.407.521.926 -	10.704.687.286-	27.16 %
		Program Pengembangan Kurikulum	160.000.000,-		70.25 %
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	252.975.575,-	177.715.400,-	92.09 %
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	632.220.000,-	582.220.000-	35.29 %
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.556.235.350,-	902.142.515,-	65.98 %
		Program Pengembangan Kapasitas Kpramukaan	293.193.000,-	193.193.000,-	90,56 %
		Program Pembinaan Perpustakaan	613.387.560 -	609.070.800	99 %
		Program Pengelolaan Arsip	3.417.500,-	3.400.000	99 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.377.928.436,-	2.275.449.617	96 %
Subtotal Sasaran			46.296.879.347	15.447.878.618	75.04 %
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	413.400.500, -	413.369.250	88,27 %
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95.178.000,-	95.178.000,-	100 %
		Pelayanan Kesehatan ibu hamil Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	413.400.500,-	413.369.250,-	88,27 %
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95.178.000,-	95.178.000,-	100 %
		Program Pengendalian Penduduk	174.956.252,-	174.956.252,-	100 %
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.520.786.050,-	7.507.286.050, -	99,82
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.139.100.000,-	1.137.180.000, -	99,83 %
Subtotal Sasaran			9.851.999.302	9.836.516.802	96.60 %
3.	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsive gender dan pemenuhan hak anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	848.257.260,-	773.166.731	91,15%





	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	234.080.000,-	228.860.000,-	97, 77 %
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	49.700.000,-	49.700.000,-	100 %
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.646.087.191,-	1.563.962.132,-	97,01 %
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	52.788.000,-	52.788.000,-	100 %
		Program Perlindungan Khusus Anak	166.580.000	165.860.000,-	99,57 %
Subtotal Sasaran			2.997.492.451	8.834.336.863	97.25 %
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	164.679.000,-	124.318.000,	75,49 %
		Program Hubungan Industrial	449.963.584,-	376.930.800	83,77 %
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	150.000.000 -,-	75.000.000	50 %
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	164.679.000,-	124.318.000	75, 49 %
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.468.835.450	2.352.359.590	95,28 %
		Program Pemberdayaan Sosial	55.200.000,-	25.200.000,-	45,65 %
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	183.494.850,-	181.121.000,-	98,70 %
		Program Peningkatan Kerja sama Desa	4.858.500,-	4.232.650,-	87,11 %
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kec. Tammero'do	1.118.245.335,0 0	1.000.839.035,0 0	89,50%
		Program Penanganan Bencana	33.400.000,-	24.000.000,-	71,85 %
		Program Rehabilitasi Sosial	15.000.000,-	14.720.000,-	98,13 %
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	165.800.000,-	165.800.000,-	100%
		Program Penanganan Bencana	33.400.000,-	24.000.000,-	71,85 %
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4.200.000-	4.200.000,-	100 %
Subtotal Sasaran			4.974.164.219	4.494.641.075	82.32 %
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel					
5.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.946.273.648,-	2.946.273.648,-	100 %
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4.196.355.250,-	4.084.945.500,-	97,35 %
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	2.862.600.700,-	2.641.900.760,-	92,29 %
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	678.393.997,-	297.196.397,-	43,81 %
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	175.913.550,-	18.760.000,-	10,66 %
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	84.830.000,-	70.770.000,-	84,42 %





		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	19.670.000,-	19.670.000,0,-	100 %
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	99.665.570.993,-	60.200.958.095,-	60,40 %
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	399,860,118,-	267,450,334,-	66,89 %
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	818.084.966,-	594.511.388,-	72,67 %
		Program Kepegawaian Daerah	1.126.200.750,-	886.373.700,-	78,70 %
Subtotal Sasaran			112.973.753.972	72.028.809.822	63.75 %
6.	Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	8.400.000,-	5.400.000,-	64,29 %
		Program Pendaftaran Penduduk	689.978.500,-	357.165.337,-	51,76 %
		Program Pengumpulan data kependudukan	190.414.511,-	15.070.000,-	79,14
		Program Pencatatan Sipil	30.550.000,-	24.930.000,-	81,60 %
		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	2.546.443.461,-	2.384.223.963,-	91,66 %
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.907.532.556,-	1.859.766.918,-	97,4
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	100.000.000,-	99.800.000,-	99,80 %
		Program Penanggulangan Bencana	1.300.000.000,-	1.296.300.000,-	99,72 %
		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	2.254.194.108,-	2.175.911.730,-	96,35 %
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	635.699.000,-,-	634,722,500,-	99,85 %
		Program Barang milik daerah penunjang urusan daerah	211.662.000,-	204.442.520,-	96,59 %
		Program Kepegawaian Daerah	1.126.200.750,-	886.373.700,-	78,70 %
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	587.819.500,-	561.905.908,-	96,59 %
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.565.000,-	3.975.000,-	34,37 %
Subtotal Sasaran			22.915.214.621	22.215.187.252	96.95 %
7.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	259.200.000,-	259.200.000,-	100 %
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1 009 243 212,-,-	981.795.632,-	97 %
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.014.653.262,-	1.942.892.61,-	97 %





		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.907.532.556,-	1.859.766.918,-	97,4
Subtotal Sasaran			5.190.629.030	5.043.655.160	97.16 %
8.	Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9.239.320.65,-	8.675.900,60,-	82,05 %
Subtotal Sasaran			9.239.32065,-	8.675.900,60,-	82,05 %
Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumbetr Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan					
9.	Meningkatnya kontribusi Pengelolaan SDA dalam Perekonomian Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	616,261,000.00	604,444,600.00	98.08 %
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterine	19,433,000.00	19,433,000.00	100 %
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.762.043.500,-	4.127.675,500,-	71,63 %
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12,158,800,-	10.243.000,-	84,24 %
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	51.869.000,-	48.678.580,-	93,84 %
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	365.641.100,-	363.440.000,-	99,39 %
		Program Pemasaran Pariwisata	65.427.072,-	50.508.000,-	77 ,19 %
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.920.200,-	9.782.000,-	98,61 %
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	4.939.000,-,-	4,012.043,-	85 %
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	13.410.000,-,-	9.910.000,-	73,90 %
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoprasian	139.400.000,-	139.400.000,-	100 %
		PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.449.000,-,-	3.449.000,-,-	100 %
		Program Pengembangan UKM	746.681.180,-	746.681.180,-	100 %
		Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan	322.238.000-	301.938.000,-	93,70 %
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentinhg	18.633.000,-,-	17.233.000,-	92, 49 %
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	9.104.500,-	9.103.500,-,-	99,99 %
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	74.886.000,-	74.886.000,-	100 %
		Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	3.004.704.378,-	2.810.423.945,-,-	93,53 %
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.607.936.755,-	1.607.936.755,-	100 %
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.190.000,-	1.190.000,-	100%





		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	226.133.000,-	90.079.000,-	39,83 %
		Program Kepegawaian Daerah	622.895.700	613.558.299,-	98, 50 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.572.686	195.483.500,-	93,07 %
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.157.363.637	3.035.693.478,-	96,15 %
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.000.000,-	12.540.000,-	89,57 %
Subtotal Sasaran			16.143.141.022	14.331.425.201	91,48 %
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	7.708.072.426,00-	6.795.693.409,78,-	88,16 %
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)	1.467.200.000,00-	1.328.147.300,00,-	90,52 %
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.894.611.695,00-	16.560.059.830,00,-	98,02 %
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.396.567.617,00-	3.198.451.437,00-	94,17 %
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (Pengelolaan SDA dan Bangunan PengamanPantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)	4.895.845.580,00 -	4.668.000.210,00 -	95,34 %
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.093.696.184,00-	8.663.071.427,00,-	95,26 %
		Program Penataan Bangunan Gedung	7.205.415.201,00-	6.954.056.576,00,-	96,51 %
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	87.013.500,00	70.994.100,00,-	81,59 %
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.071.585.093,00 -	4.751.623.013,00,-	93,69 %
		Program Kawasan Permukiman	160.680.000,-	152.729.000,-	94,95 %
		Program Penyelesain ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	3.369.000.000,-	2.940.046.342,-	80,79 %
		Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	20.000.000,-	15.000.000,-	85,50 %
Subtotal Sasaran			59.310.021.279	54.148.271.122	91,63%
11.	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	164.416.000,00,-	136.297.000,00,-	82,90 %
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	113.197.900,00,-	112.093.500,00-	89,02 %
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	2.420.481.994,00,-	2.320.265.652,00 -	95,86 %
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.099.842.833,00	3.983.665.732,00 ,-	97,17 %
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	38.808.790,-	5.531.000,-	39,24 %





		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	38,808,790,-	38.759.000,-	99,87 %
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	61.462.463,-	42.344.500,-	68,89 %
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	16.723.542,-	6.746.400,-	40,34 %
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.386.104.050,-	2.709.404.050,	80,27 %
		Program Kawasan Pemukiman	650.000.000,-	457.048.575,-	70,31 %
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.639.000.000,-	2.940.046.342,-	80,79 %
		Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	20.000.000,-	10.000.000,-	50 %
Subtotal Sasaran			13.649.638.161	12.824.111.001	73,80 %
Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis					
12.	Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	37.540.148,30,-	82.560.762,-	2,19 %
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	38.050.126,70,-	123.060.301,-	3,23 %
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	3.188.063,90,-	125.365.306,-	39,32 %
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10.000.000,-	10.000.000,-	100%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	15.852.095,-	116.121.959,-	73,2 %
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta budaya Politik	2.539.913,80,-	41.378.735,-	16,29 %
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.442.038.258,-	1.430.200.658,-	99, 17 %
		Program Pembinaan Sejarah	200.000.000,-	199.678.000,-	99,83 %
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	659.699.298,-	659.699.298,-	100 %
		Program Pengelolaan Permuseuman	1.239.100.000,-	1.226.785.750,-	99,00 %
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	212.400.00,-	194.700.00,	91,67 %
Subtotal Sasaran			3.696.562.937	4.226.249.077	65,81 %

Sumber : Data Badan Perencanaan Daerah Kab. Majene Tahun 2025





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan skema Tugas Pembantuan, hal tersebut dilaksanakan karena tidak semua kewenangan dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah pusat sehingga perlu untuk dilakukan pendelegasian tugas kepada Daerah Otonom. Dengan dilaksanakannya pendelegasian tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara kita menganut 3 (tiga) asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Ketiga asas tersebut dilaksanakan secara selaras, serasi, seimbang guna mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang desentralistik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi distribusi, stabilitas dan alokasi. Fungsi distribusi dan stabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah, yaitu Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun secara nyata dana tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun nonfisik. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan suatu upaya dalam membantu daerah mencapai kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ini menjadi sangat penting, karena pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di Daerah.

Pengertian Tugas Pembantuan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 11 adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum serta membantu Pengembangan Pembangunan bagi Daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota serta Desa).



Dana Tugas Pembantuan merupakan anggaran dari Kementerian yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberikan penugasan. Dana Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Negara / Lembaga yang dialokasikan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Negara / Lembaga dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota.

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Adapun Dasar Hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4355);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4816);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5887);
- m. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
- q. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati / Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapata dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 menerima 3 (*tiga*) Tugas Pembantuan (TP) dari 3 (*tigas*) Kementerian pada Bidang Urusan Tenaga Kerja, Perdagangan, dan Pertanian dengan jumlah 3 (*tiga*) kegiatan, yang dilaksanakan oleh 3 (*tiga*) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan anggaran sebesar Rp. 3.927.845.567,- Terbilang : (*Tiga milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Kementerian pemberi Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- c. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten / Kota

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Target Kinerja

Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, Wirausaha Baru, dan Tenaga Kerja Mandiri menargetkan Kepesertaan diikuti sampai dengan 140 Orang.

b. Realisasi

Realisasi atas Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, Wirausaha baru, dan Tenaga Kerja Mandiri mencapai 100%.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

a. Target Kinerja

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan menargetkan Pembangunan / Revitalisasi 1 Pasar Rakyat Malunda.

b. Realisasi

Realisasi atas Kegiatan Pengembangan Sarana dan Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan mencapai 100%.



3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

a. Target Kinerja

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura menargetkan Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yaitu Bawang Merah sebesar 240 Ton dan Cabai Rawit sebesar 300 Ton.

b. Realisasi

Realisasi atas Kegiatan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura yaitu Bawang Merah mencapai 640 Ton atau sebesar 266,67% dan Cabai Rawit mencapai 352 Ton atau sebesar 117,33%.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024

No.	Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Keluaran (Output) : Jumlah Wirausaha Baru dan Tenaga Kerja Mandiri Rincian Kegiatan : Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Majene	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 492.390.000	Rp. 489.344.397	99,38	140 Orang	100	

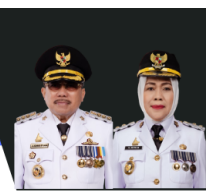




No.	Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Republik Indonesia Perdagangan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati / Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Keluaran (Output) : Jumlah Pasar Rakyat yang terbangun Rincian Kegiatan : Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Malunda Kec. Malunda Kab. Majene	Kec. Malunda Kab. Majene	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.363.798.900	94,55	1 Pasar Rakyat	100	
3.	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan	Program Pembangunan Pertanian Kegiatan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Keluaran (Output) : Jumlah Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Rincian Kegiatan : Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Komoditi Unggulan Daerah yaitu Bawang Merah dan Cabai Rawit	Kab. Majene	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Rp. 935.455.567	Rp. 903.182.350	96,55	Bawang Merah : 640 Ton Cabai Rawit : 352 Ton	266,67 117,33	
Total						Rp. 3.927.845.567	Rp. 3.756.325.647	95,63			

Sumber : Data OPD Pelaksana Tugas Pembantuan di Kab. Majene Tahun Anggaran 2024





3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten / Kota

Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 tidak menerima Tugas Pembantuan Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

3.4. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya dana pembelanjaan bantuan barang yang diserahkan kepada kelompok, sehingga masih perlu penambahan kelengkapan alat-alat yang dibutuhkan;
- b. Dalam kegiatan pelatihan, masih diperlukan penambahan waktu pelaksanaan dari tiga hari menjadi lima hari;
- c. Masih diperlukan tenaga pendamping dalam membina kelompok usaha tenaga kerja mandiri di lapangan.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Alokasi Anggaran ke Kabupaten Majene yang terlambat sehingga menghambat Percepatan Pelaksanaan Pembangunan;
- b. Terdapat Pemotongan Pagu Anggaran akibat Refocussing sebagai Dampak Covid-19, sehingga yang awalnya Rencana Bangunan harus sesuai dengan Prototipe yang diberikan oleh Pihak Kementerian dan akhirnya Rencana Bangunan disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang dialokasikan ke Kabupaten Majene.

3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan tidak menemui kendala yang berarti.

3.5. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Saran dan tindak lanjut dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam pelaksanaan kegiatan dimasa akan datang, dibutuhkan dana yang cukup untuk melengkapi kelompok usaha yang dibimbing, serta dapat menjangkau para pengangguran yang selama ini belum tersentuh kegiatan pelatihan. Tindak lanjut yang diharapkan adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap sejalan untuk melaksanakan kegiatan tugas pembantuan.

2. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan kedepan, yaitu agar Realisasi Alokasi Anggaran ke Kabupaten sebisa mungkin untuk dipercepat, mengingat untuk Pelaksanaan Pembangunan membutuhkan waktu yang sangat tergantung dari Iklim Cuaca.

3. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene tidak memiliki saran dan tindak lanjut.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Majene secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dengan rincian jenis pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini:

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun).

2. Pendidikan dasar:

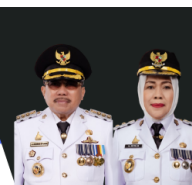
Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang terbagi dalam dua jenjang pendidikan, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Pertama.

3. Pendidikan kesetaraan:

Penerima pelayanan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

5 Target dan Realisasi Pencapaian SPM

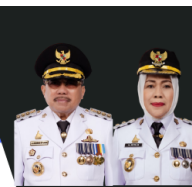
Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan oleh Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:



Tabel: Target SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.380	Tahun 2025	Angka partisipasi sekolah	87,23	Tahun 2025
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	48,48	Tahun 2025
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	67,85	Tahun 2025
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	3.083	Tahun 2025	Sekolah Dasar (SD)		
					Angka partisipasi sekolah	97,82	Tahun 2025
					Kemampuan literasi	48,82	Tahun 2025
					Kemampuan numerasi	48,46	Tahun 2025
					Indeks iklim keamanan	73,83	Tahun 2025
					Indeks iklim kebinekaan	70,01	Tahun 2025
					Indeks iklim inklusivitas	58,58	Tahun 2025





No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu	Indikator	Target	Batas Waktu
					Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
					Angka partisipasi sekolah	97,82	Tahun 2025
					Kemampuan literasi	56,41	Tahun 2025
					Kemampuan numerasi	54,51	Tahun 2025
					Indeks iklim keamanan	66,29	Tahun 2025
					Indeks iklim kebinekaan	67,05	Tahun 2025
					Indeks iklim inklusivitas	53,94	Tahun 2025
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8.173	Tahun 2025	Angka partisipasi sekolah	41,10	Tahun 2025

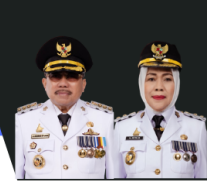


Realisasi dan Alokasi

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene pada Dinas Pendidikan bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Tahun 2025 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

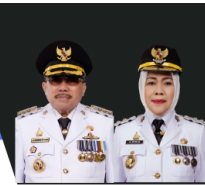
Tabel.
Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
	Urusan Pendidikan Kab. Majene	9.734.853.767	8.986.796.310	92,32 %
1.	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	3.078.002.270	2.964.811.369	96,32 %
a.	Angka Partisipasi Sekolah	1.917.927.270	1.843.797.815	96,13 %
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	299.980.270	291.243.874	97,09 %
2.	R/ Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	99.155.000	98.805.200	99,65 %
3.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	318.792.000	316.696.518	99,34 %
4.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan/ Pengadaan Mebel PAUD	1.200.000.000	1.137.052.223	94,75 %
b.	Kekhususan PAUD	1.160.075.000	1.121.013.554	96,63 %
1.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	728.126.000	725.873.554	99,69 %
2.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	222.551.000	203.151.000	91,28 %
3.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	209.398.000	191.989.000	91,69 %



No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
2.	Program SPM Pendidikan Sekolah Dasar	3.688.301.440	3.416.709.983	92,64 %
a.	Angka Partisipasi Sekolah	3.097.845.440	2.931.837.483	94,64 %
1.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.200.000.000	1.138.248.515	94,85 %
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.897.845.440	1.793.588.968	94,51 %
b.	Literasi dan Numerasi	500.392.500	421.109.000	84,16 %
1.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	384.935.000	384.025.000	99,76 %
2.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	48.873.500	-	0 %
3.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	66.584.000	37.084.000	55,70 %
c.	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusifitas	90.063.500	63.763.500	70,80 %
1.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	90.063.500	63.763.500	70,80 %
2.	Program SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.968.550.057	2.605.274.958	87,32 %
a.	Angka Partisipasi Sekolah	2.255.168.057	2.038.910.958	90,41 %
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.055.168.057	874.065.552	82,84 %
2.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.200.000.000	1.164.845.406	97,07 %
b.	Literasi dan Numerasi	620.139.000	498.617.000	80,40 %
1.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	422.800.000	416.630.000	98,54 %





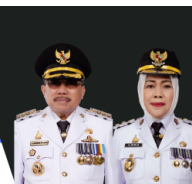
2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	50.000.000	100 %
3. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	25.496.000	-	0 %
4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.628.000	-	0 %
5. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	56.272.000	31.987.000	56,84 %
6. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	14.943.000	-	0 %
c. Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusifitas	93.243.000	67.747.000	62,62 %
1. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	25.496.000	-	0 %
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	67.747.000	67.747.000	100 %

6

Hasil Capaian

Hasil capaian atau realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun 2025 dengan tiga jenis pelayanan dasar, SPM urusan Pendidikan mencapai 89,96 % (Tuntas Madya). Berikut capaian SPM Pendidikan Tahun 2025:

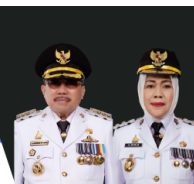




Tabel. Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian	Indikator	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.380	8.169	100,00 %	Angka partisipasi sekolah	87,23	84,70	97,23 %
						Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	48,48	38,46	79,38 %
						Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	67,85	65,42	96,42 %
						Sekolah Dasar (SD)			
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi/SMP/MTs)	3.083	26.746	100,00 %	Angka partisipasi Sekolah	97,82	97,27	99,44 %
						Kemampuan literasi	48,48	47,86	98,03 %
						Kemampuan numerasi	48,46	50,14	100,00 %
						Indeks iklim keamanan	73,83	72,93	98,78 %
						Indeks iklim kebinekaan	70,10	69,09	98,56 %
						Indeks iklim inklusivitas	58,58	56,07	95,72 %





						Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
						Angka partisipasi sekolah	97,82	93,06	95,13 %
						Kemampuan literasi	56,41	45,00	79,77 %
						Kemampuan numerasi	54,59	44,50	81,52 %
						Indeks iklim keamanan	66,29	64,79	97,74 %
						Indeks iklim kebinekaan	67,05	66,04	98,49 %
						Indeks iklim inklusivitas	53,94	51,53	95,53 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	8.173	5.631	68,90 %				
						Angka partisipasi sekolah	41,10	36,97	89,95 %



Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi yang ada dalam pelaksanaan SPM di Urusan Pendidikan antara lain:

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya kemampuan dan pemahaman pelaksana teknis dalam menganalisis kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan belum mengacu pada perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor pendidikan
- Penyediaan layanan dasar Pendidikan Kesetaraan belum optimal menjangkau seluruh anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Majene
- Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam keseluruhan tahapan penerapan dan pemenuhan SPM di Internal Dinas Pendidikan, baik dalam hal capaian indikator layanan SPM maupun anggaran yang mendukung kegiatan dan sub kegiatan SPM

Solusi

Upaya pemecahan yang dapat dilakukan atas permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- Mengadakan kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas pelaksana teknis pengampu indikator SPM
- Perencanaan kegiatan dan sub kegiatan perlu diselaraskan dengan perencanaan berbasis data dengan menganalisis rapor pendidikan.
- Melaksanakan koordinasi dengan operator sekolah mengenai validasi data anak putus sekolah pada aplikasi kemendikbud dan koordinasi dengan PKK dan Dinas PMD mengenai validasi data anak usia sekolah yang belum pernah bersekolah, sehingga dapat difasilitasi secara optimal dalam Pendidikan Kesetaraan.

- d) Perlunya komitmen bersama, baik pengambil keputusan maupun pelaksana teknis pengampu SPM di Dinas Pendidikan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi tahapan penerapan dan pemenuhan SPM Pendidikan sehingga target setiap indikator yang direncanakan dapat dicapai secara maksimal dan anggaran yang mendukung pencapaian tersebut dapat dialokasikan secara efisien.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota terdiri dari 12 jenis layanan dasar yaitu:

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar :

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

1) Standar kuantitas.

2) Standar kualitas.

c. Mekanisme Pelayanan

Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan

mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 1) Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - a) Satu kali pada trimester pertama.
 - b) Satu kali pada trimester kedua
 - c) Dua kali pada trimester ketiga.
- 2) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - a) Pengukuran berat badan.
 - b) Pengukuran tekanan darah.
 - c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 - d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - e) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
 - f) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet
 - h) Tes Laboratorium.
 - i) Tatalaksana/penanganan kasus.
 - j) Temu wicara (konseling).

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase ibu} \\ \text{hamil} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesehatan ibu} \\ \text{hamil} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah ibu hamil yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan antenatal} \\ \text{sesuai standar di wilayah kerja} \\ \text{kabupaten/kota tersebut dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \\ \text{(Nominator)} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah sasaran ibu hamil di} \\ \text{wilayah kerja kabupaten/kota} \\ \text{tersebut dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama (denominator)} \end{array}} \times 100 \%$$

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:

- 1) Persalinan normal.
- 2) Persalinan komplikasi.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
 - a) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - Dokter dan bidan, atau
 - 2 orang bidan, atau
 - Bidan dan perawat.
- 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	
	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	x 100 %

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

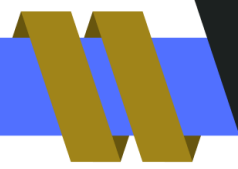
b. Pengertian

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:

- 1) Standar kuantitas.
- 2) Standar kualitas.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.



2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

- a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam
- b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari
- c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

3) Standar kualitas:

a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).

Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

- Pemotongan dan perawatan tali pusat.
- Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- Injeksi vitamin K1.
- Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
- Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).

b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).

Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

- Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Eksklusif
- Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Presentase} \\ \text{bayi baru lahir} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesehatan bayi} \\ \text{baru lahir} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28} \\ \text{hari yang mendapatkan pelayanan} \\ \text{kesehatan bayi baru lahir sesuai} \\ \text{dengan standar dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di} \\ \text{wilayah kerja kabupaten/kota} \\ \text{tersebut dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama} \end{array}} \times 100 \%$$

4) Pelayanan kesehatan balita

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan balita sehat.
- 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- 2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun.

- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
- Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 - Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
- d) Pemantauan perkembangan balita.
- e) Pemberian kapsul vitamin A.
- f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g) Pemberian imunisasi lanjutan.
- h) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i) Edukasi dan informasi
- 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- d. Capaian Kinerja
 - 1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0 -59 bulan

dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan} \\ \text{Pelayanan} \\ \text{Kesehatan Balita} \\ \text{sesuai Standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan} \\ \text{yang mendapat Pelayanan Kesehatan} \\ \text{sesuai Standar}^1 + \text{Jumlah Balita} \\ \text{usia 24-35 bulan mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan sesuai} \\ \text{standar}^2 + \text{Balita usia 36-59 bulan} \\ \text{mendapatkan pelayanan sesuai} \\ \text{standar}^3 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan} \\ \text{di wilayah kerja Kabupaten/kota} \\ \text{tersebut pada kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :

- 1) Skrining kesehatan.
- 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

c. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Skrining kesehatan

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a) Penilaian status gizi.
- b) Penilaian tanda vital.
- c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d) Penilaian ketajaman indera

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{anak usia} \\ \text{pendidikan} \\ \text{dasar yang} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesehatan} \\ \text{sesuai standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah anak usia pendidikan} \\ \text{dasar yang mendapat pelayanan} \\ \text{kesehatan sesuai standar yang} \\ \text{ada di wilayah kerja} \\ \text{kabupaten/kota dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun ajaran} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah semua anak usia} \\ \text{pendidikan dasar yang ada di} \\ \text{wilayah kerja kabupaten/kota} \\ \text{tersebut dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun ajaran yang sama.} \end{array}} \times 100 \%$$

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar



Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.
- 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah.
 - d) Anamnesa perilaku berisiko.
- 4) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan.

d. Capaian Kinerja

- 1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus Perhitungan Kinerja

		Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	
Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$	X 100%

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan

mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku berisiko
 - h) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - Melakukan rujukan jika diperlukan
 - Memberikan penyuluhan kesehatan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase	Jumlah warga negara berusia 60 tahun	
warga negara	atau lebih yang mendapat skrining	
usia 60	kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	
tahun ke	yang ada di suatu wilayah kerja	
atas	kabupaten/kota dalam kurun waktu satu	
mendapatkan	tahun (Nominator)	x 100 %
skrining	Jumlah semua warga negara berusia 60	
kesehatan	tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah	
sesuai	kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu	
standard	satu tahun yang sama (Denominator)	

$$= \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)}} \times 100 \%$$

8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran tekanan darah
- 2) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - c) Melakukan rujukan jika diperlukan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	=	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$
---	---	--

9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:

- 1) Pengukuran gula darah;
- 2) Edukasi
- 3) Terapi farmakologi.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
- c) Melakukan rujukan jika diperlukan

Keterangan:

Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	=	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	X 100%
		Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	

10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- 2) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - a) Pemeriksaan status mental
 - b) Wawancara
- 3) Edukasi kepatuhan minum obat.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus Perhitungan Kinerja

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$
--	--

11) Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.Pemerintah

Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

b. Pengertian

Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

- 1) Pemeriksaan klinis
- 2) Pemeriksaan penunjang
- 3) Edukasi

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
- 3) Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- 4) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 5) Melakukan rujukan jika diperlukan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$$

12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar



a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko
- 2) Skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.

- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkoba dan atau zat adiktif suntik lainnya
- 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

c. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan

d. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{orang dengan} \\ \text{risiko terinfeksi} \\ \text{HIV} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{deteksi dini HIV} \\ \text{sesuai standar} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang dengan risiko} \\ \text{terinfeksi HIV yang} \\ \text{mendapatkan pelayanan sesuai} \\ \text{standar dalam kurun waktu} \\ \text{satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang dengan risiko} \\ \text{terinfeksi HIV dikab/kota} \\ \text{dalam kurun waktu satu tahun} \\ \text{yang sama} \end{array}} \times 100 \%$$

5 Target dan Realisasi Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
10	Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan	persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar	100 %



	Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i> = HIV)		
--	--	--	--

Realisasi Pencapaian SPM tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN SPM KESEHATAN	CAPAIAN KINERJA			KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KESEHATAN
		CAPAIAN PENERIMA LAYANAN BOBOT 80%	CAPAIAN MUTU BARANG/JAS A /SDM BOBOT 20%	KINERJA LAYANAN	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Ha	58,09%	17,35%	75,44%	77,24%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	66,98%	16,70%	83,68%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	76,19%	16,58%	92,76%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	50,47%	11,71%	62,18%	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	77,93%	11,22%	89,15%	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	50,91%	12,64%	63,55%	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	56,48%	10,34%	66,83%	
8	Pelayanan Kesehatan Pende Hipertensi	48,30%	16,82%	65,11%	
9	Pelayanan Kesehatan Pende Diabetes Melitus	63,67%	16,90%	80,57%	
10	Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	68,01%	15,30%	83,31%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80,00%	13,31%	93,31%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i> = HIV)	58,67%	12,36%	71,03%	





Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Alokasi anggaran belanja dan realisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagai pelaksana urusan wajib kesehatan sebesar Rp. 115.297,118.961,- dengan realisasi sebesar Rp. 108.504.848.103,- dengan persentase sebesar 94,11% dengan rincian sebagai berikut:

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU	REALISASI	%
Dinas Kesehatan				
1	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	Rp 6.369.497.000,-	Rp 6.001.727.927,-	94,23
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Rp 4.237.129.000	Rp 3.900.514.610	92,06
3	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Rp 27.272.671.652	Rp 26.437.050.237	96,94
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 208.879.396	Rp 173.197.235	82,92
5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Rp 33.593.233.519	Rp 33.486.084.285	99,68
6	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Rp 5.601.774.097	Rp 5.591.293.944	99,81
7	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	75,00
8	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	0,00
9	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 8.032.422.309	Rp 5.844.665.955	72,76
Puskesmas				
10	DAK Non Fisik BOKKB-BOK	Rp. 10.288.893.000	Rp. 8.717.779.263	84,73
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Rp -	Rp -	0,00
12	Pendapatan BLUD	Rp.19.672.618.988	Rp. 18.337.534.647	93,21
TOTAL		Rp. 115.297.118.961	Rp. 108.504.848.103	94,11



DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil dalam mendukung pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Majene tahun 2024 adalah 1.250 pegawai yang terdiri dari 425 orang ASN, 9 orang P3K dan 816 orang Non ASN yang terdiri dari kontrak daerah dan sukarela yang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dan 11 Puskesmas dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Permasalahan :

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2024 sebesar 72,6 %, capaian tersebut masih belum mencapai target dan meningkat dibandingkan tahun 2023 capaian sebesar 70,1% . Hal ini disebabkan karena:

- a. Masih tingginya K1 Akses yaitu ibu hamil datang periksa pada usia kehamilan disebabkan karena akses sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan, masih ada puskesmas dengan dokter belum terlatih pelayanan USG
- b. Pernikahan di usia Dini, kehamilan diluar nikah dan masih ada masyarakat belum paham pentingnya pemeriksaan kehamilan secara dini karena masih kurang mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya memeriksakan ibu hamil secara dini karena kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut
- c. masih ada Bidan yang tidak mempunyai kendaraan Dinas untuk menjangkau wilayah kerjanya
- d. Masih terbatas pemeriksaan skreening strip Hb di Puskesmas



Solusi

- a. Bekerjasama dengan lintas terkait agar semua calon pengantin (catin) dapat terlayani sesuai standar
- b. Mengaktifkan kawal bumil disetiap wilayah Puskesmas
- c. Kegiatan pelatihan USG terbatas bagi Dokter Puskesmas
- d. Penguatan koordinasi antar Puskesmas jaringan dan jejaring dalam pelayanan Ibu hamil
- e. Pelayanan K1 dan K5 dilaksanakan di puskesmas

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2024 sebesar 83,7%. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan (100%) tetapi menurun dibandingkan tahun 2023 dengan capaian sebesar 95,8%, hal ini disebabkan:

- a. Masih ada daerah dengan akses sulit dan terpencil (Ulumanda,Malunda,Tammeroddo,Sendana dan Pamboang) sehingga terhambat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan.
- b. Distribusi Bidan tidak merata di daerah akses sulit dan terpencil menyebabkan masih ada sarana kesehatan di daerah sulit dan terpencil tidak memiliki tenaga kesehatan bidan
- c. Masih terbatasnya Dokter Umum di puskesmas sehingga belum optimal terlibat dalam pelayanan persalinan,standar indikator yang baru yaitu dengan persalinan yang dilakukan minimal 3 orang nakes (Dokter,Bidan /Bidan,Bidan /Perawat) belum mendapat dukungan secara penuh sehingga masih kurang sosialisasi tentang persalinan fasyankes dengan Enam tangan,menyebabkan penertiban praktek swasta tanpa adanya Dokter masih dianggap menghambat pelayanan di praktek swasta

Solusi

- a. Mengadvokasi ke pemerintah Desa atau kecamatan dalam perbaikan sarana transportasi agar dapat menjangkau daerah sulit dan terpencil,
 - b. Melakukan koodinasi dengan Puskesmas agar melakukan pembinaan ke TPMB, penguatan kawal bumil di wilayah puskesmas, agar semua bidan dapat difasilitasi kendaraan Dinas,
 - c. Mengusulkan kebutuhan Dokter umum di Puskesmas ke BPKSDM Pemerataan tenaga kesehatan bidan terutama di wilayah kerja puskesmas kategori pedesaan dan terpencil
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

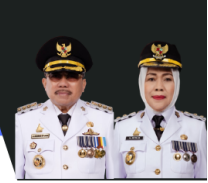
Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2024 tercapai 95,2%, menurun dibandingkan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 96,8% dan belum memenuhi target karena:

- a. Masih ada daerah dengan akses sulit dan terpencil, Distribusi Bidan di daerah akses sulit dan terpencil yang belum merata sehingga terjadinya kasus persalinan oleh non Nakes sehingga pelayanan kunjungan neonatus pertama masih ada yang belum dilakukan,.
- b. Masih ada Bidan Desa belum memiliki Kendaraan Dinas sehingga pelayanan Kunjungan Neonatus tidak dilakukan secara optimal
- c. Masih ada Sarana kesehatan di desa yang tidak memiliki tenaga kesehatan bidan .

Solusi

- a. Mengadvokasi ke pemerintah Desa atau kecamatan dalam perbaikan sarana transportasi agar dapat menjangkau daerah sulit dan terpencil.



- b. Melakukan penguatan dengan Dukun beranak agar tidak melakukan pertolongan persalinan tapi mendampingi ke fasyankes
- c. Penguatan kawal bumil di wilayah puskesmas, agar semua bidan dapat difasilitasi kendaraan Dinas

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2024 sebesar 63,1% menurun dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 64,4%. Rendahnya cakupan ini disebabkan karena:

- a. Terbatasnya tenaga terlatih Pemantau perkembangan, pemantauan perkembangan melalui buku KIA di Posyandu belum merata dilakukan di semua posyandu secara rutin.
- b. Belum terinput bagian perkembangan dalam aplikasi e-PPGBM, bahan formula penanganan gizi belum tersedia di Puskesmas.
- c. Instrumen pemantauan perkembangan dan Buku KIA terbatas.
- d. Tenaga Pengelola SPM 4 Di Puskesmas masih perlu untuk dilakukan pembimbingan terkait Defenisi Operasional dengan adanya PMK No.6 Tahun 2024

Solusi

- a. Bimtek DO dan Pencatatan Dan Pelaporan Bagi pengelola SPM di puskesmas dan Bidan Desa.
 - b. Peningkatan Kompetensi pemantauan Perkembangan bagi Kader posyandu melalui Buku KIA.
5. Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2024 sebesar 97,4%. Capaian tahun 2023 meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 85,0%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum terpenuhinya capaian tersebut diantaranya:
- a. Ketersediaan buku rapor kesehatan dan buku pemantauan kesehatan tidak ada di setiap Puskesmas.



- b. Format skrining, alat skrining dan BMHP skrining sangat terbatas di Puskesmas.
- c. SDM terbatas masih merangkap beberapa program.
- d. Ada beberapa sekolah di wilayah kerja Puskesmas dengan akses sulit

Solusi

- a. Penyediaan buku rapor dan buku pemantauan kesehatan sesuai jumlah peserta didik termasuk format skrining.
- b. Pemenuhan SDM sesuai kebutuhan Puskesmas.
- c. Melakukan Puskel khusus di wilayah dengan akses sulit

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

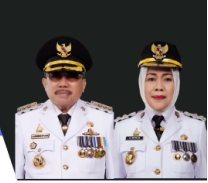
Permasalahan

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2024 sebesar 63,6%. Capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan dan meningkat dari capaian tahun 2023 yaitu 60,3%. Beberapa faktor belum tercapainya target adalah :

- a. Ketersediaan/keterbatasan logistik, antara lain ketersediaan media KIE, Strip Glukosa dan keterbatasan SDM seperti dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga kesmas dan kader kesehatan terlatih.
- b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat/sasaran usia produktif untuk melakukan kunjungan ke posbindu dalam rangka deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.
- c. Kecenderungan masyarakat yang ingin mendapatkan skrining penyakit lain seperti kolesterol, asam urat turut mempengaruhi minat masyarakat dalam berkunjung ke posbindu.
- d. Kesibukan masyarakat dengan aktifitas pekerjaan sehari-hari sehingga tidak menyempatkan diri berkunjung ke posbindu sesuai jadwal.
- e. Pergantian petugas ataupun kader yang masih terjadi.

Solusi





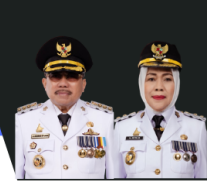
- a. Dibutuhkan penyediaan media KIE dan strip glukosa yang memadai sesuai kebutuhan serta penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar di setiap UPTD Puskesmas.
 - b. Edukasi kepada masyarakat/sasaran keluarga tentang pentingnya melakukan skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan bahaya yang dapat terjadi apabila tidak dilakukan deteksi dini PTM.
 - c. Perlu melakukan kegiatan pelayanan terpadu secara mobile/ Pelayanan Kesehatan Bergerak/Puskesmas Keliling di wilayah dengan akses sulit setiap bulan, dengan didukung biaya operasional yang cukup.
 - d. Koordinasi yang baik dengan petugas-petugas kesehatan di desa, lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan posbindu PTM.
 - e. Sesuaikan jadwal Posbindu dengan ketersediaan waktu oleh sasaran untuk datang berkunjung ke posbindu, misalnya pelaksanaannya di sore hari dengan memaksimalkan sumber daya kader kesehatan
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2024 sebesar 70,6% telah meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai tercapai 64,9%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut diantaranya :

1. Anggaran kegiatan tidak ada di level PKM sehingga pelaksanaan skrining kesehatan tidak berjalan maksimal, dan anggaran di level Dinas Kesehatan terbatas sehingga pelaksanaan monev program dan kegiatan yang mendukung SPM pelayanan kesehatan Lansia sesuai standar tidak mencapai target

Solusi



2. Mengusulkan anggaran pelayanan kesehatan Lansia melalui DAK NF dan DAU KesMembuat suatu inovasi yang bisa meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Lansia sesuai standar,

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Permasalahan

Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 5.988 jiwa, berdasarkan komponen cakupan ini baru mencapai 60,4%. Capaian tersebut masih sangat jauh dari target yang ditetapkan dan meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 51,3%. Hal ini disebabkan karena:

- a. Ketersediaan/keterbatasan logistik, antara lain ketersediaan media KIE, keterbatasan SDMK seperti dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga promkes, tenaga kefarmasian dan tenaga kesmas.
- b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat/penderita hipertensi dan keluarga untuk melakukan kontrol terhadap penyakitnya setiap bulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Terdapat beberapa wilayah dengan akses masyarakat/penderita dan keluarga ke fasyankes cukup sulit seperti di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ulumanda, sehingga penderita Hipertensi tidak rutin dalam kontrol pengobatan setiap bulan.

Solusi

- a. Dibutuhkan penyediaan media KIE yang memadai sesuai kebutuhan serta penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar di setiap UPTD Puskesmas.
- b. Edukasi kepada masyarakat/penderita dan keluarga tentang pentingnya melakukan kontrol terhadap penyakitnya setiap bulan dan bahaya yang dapat terjadi apabila tidak rutin/patuh dalam tatalaksana pengobatan setiap bulan.

- c. Perlu melakukan kegiatan pelayanan terpadu secara mobile/ Pelayanan Kesehatan Bergerak/Puskesmas Keliling di wilayah dengan akses sulit setiap bulan, dengan didukung biaya operasional yang cukup. Dibutuhkan penyediaan media KIE yang memadai sesuai kebutuhan serta penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar di setiap UPTD Puskesmas.
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Permasalahan

Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 955 jiwa (79,6%). Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 106,0%. Hal ini disebabkan

- B. Ketersediaan/keterbatasan logistik, antara lain ketersediaan media KIE, Strip Glukosa dan keterbatasan SDMK seperti dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga promkes, tenaga kefarmasian dan tenaga kesmas.
- C. Masih kurangnya partisipasi masyarakat/penderita Diabetes Melitus dan keluarga untuk melakukan kontrol terhadap penyakitnya setiap bulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- D. Terdapat beberapa wilayah dengan akses masyarakat/penderita dan keluarga ke fasyankes cukup sulit seperti di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ulumanda, sehingga penderita Diabetes tidak rutin dalam kontrol pengobatan setiap bulan.

Solusi

- a. Dibutuhkan penyediaan media KIE dan strip glukosa yang memadai sesuai kebutuhan serta penyediaan tenaga kesehatan sesuai standar di setiap UPTD Puskesmas.
- b. Edukasi kepada masyarakat/penderita dan keluarga tentang pentingnya melakukan kontrol terhadap penyakitnya setiap bulan dan bahaya yang dapat terjadi apabila tidak rutin/patuh dalam tatalaksana pengobatan setiap bulan.

- c. Perlu melakukan kegiatan pelayanan terpadu secara mobile/ Pelayanan Kesehatan Bergerak/Puskesmas Keliling di wilayah dengan akses sulit setiap bulan, dengan didukung biaya operasional yang cukup.
- d. Koordinasi yang baik dengan petugas-petugas kesehatan di desa, lintas sektor dan keluarga penderita dalam tatalaksana penderita Diabetes Melitus.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Majene tahun 2024 ditetapkan menggunakan angka prevalensi OGDJ (orang dengan gangguan jiwa) Provinsi Sulawesi Barat (Perhitungan SPM ODGJ) terhadap proyeksi penduduk semua usia Kabupaten Majene sehingga didapatkan sebesar 367 jiwa, sedangkan jumlah OGDJ (orang dengan gangguan jiwa) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 312 jiwa (85,0%). Capaian tersebut masih kurang dari target namun telah meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 92,9%

Permasalahan

Tidak ada rumah rehabilitasi pasien ODGJ

Solusi

Melakukan permintaan anggaran, tetap melakukan followup terhadap PMO keswa dengan Sumber daya yang ada, Kerjasama LP/LS untuk kegiatan pelacakan terhadap kasus ODGJ

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) tahun 2024 sebesar 170,2% dan telah memenuhi target Nasional dan menurun dibanding tahun 2024 sebesar 180,1%. Hal ini disebabkan karena:

- a. Kegiatan penemuan terduga TBC dilakukan tidak hanya pada penderita dengan gejala klinis TBC tetapi juga kepada factor risiko seperti : Ibu hamil, Penderita DM, Lansia, dan kontak erat penderita).
- b. Kegiatan penemuan kasus TBC telah di fasilitasi dengan 4 mesin Test Cepat Molekuler (TCM) untuk memudahkan pemeriksaan terduga TBC (RSUD majene, PKM Sendana I, PKM sendana II dan PKM Malunda).
- c. Kerja sama lintas program semakin baik terbukti dengan semakin banyaknya factor risiko TBC yang diperiksa dahaknya sehingga capaian tahun 2024 bisa mencapai target.

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Orang berisiko terinfeksi HIV yang sudah mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di Kabupaten Majene tahun 2024 tercapai 73,3%. Capaian ini telah lebih rendah dari dari capaian tahun 2023 sebesar 81,9% dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

Permasalahan

- a. Masih ada sasaran terutama populasi kunci tidak melakukan pemeriksaan HIV secara mandiri/keinginan sendiri dikarenakan masih ada rasa malu/takut jika terdeteksi.

Solusi

Tindak lanjut kondisi tersebut antara lain dengan:

- a. Perlu dukungan lintas sektor dan edukasi aktif tentang HIV

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis – jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan dasar antara lain :

Tabel. Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Penerima Layanan	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rumah Tangga	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	Setiap Tahun

2. Target Pencapaian SPM

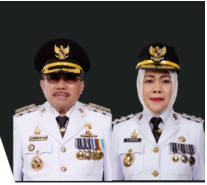
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel. Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Program	Alokasi Anggaran
1	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.093.696.184
2	Penyediaan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.894.611.695

1. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Capaian dan Perhitungannya	Alokasi Anggaran
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Capaian Tahunan : $\frac{\text{Jumlah masyarakat yg rumah tangga yg mendapatkan terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dlm sebuah kab/kota}}{\text{Jumlah total penduduk yang berhak terlayani}} \times 100$ $\frac{3652}{3652} \times 100 = 100 \%$ Capaian Kumulatif : $\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yg rumah tangga yg mendapatkan terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dlm sebuah kab/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab.kota tersebut}} \times 100$ $\frac{38.753}{54.028} \times 100 = 71,73\%$	9.093.696.184
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100 %	Capaian Tahunan : $\frac{\text{jumlah rumah tangga yang terlayani sarana air limbah}}{\text{Jumlah total rumah tangga yang berhak terlayani}} \times 100$ $\frac{1720}{1720} \times 100 = 100 \%$ Capaian Kumulatif : $\frac{\text{Jumlah rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk+ jml jml rumah yg lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jml rumah yg memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah tangga di seluruh kab.kota}} \times 100$ $\frac{38.579}{54.028} \times 100 = 71,41 \%$	16.894.611.695

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Yarget Capaian		Realisasi Capaian		Realisasi Capaian
			Jml Org yg akan terlayani	Alokasi Anggaran	Jml Org yg terlayani	Alokasi Anggaran	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	3652	9.093.696.184	3652	8.663.071.427	100 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1720	16.894.611.695	1720	16.560.059.830	100 %





No.	Indikator SPM	Realisasi Capaian Tahun 2025	Realisasi Capaian s/d Tahun 2025
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	71,73 %
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	71,41 %

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Jumlah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Majene.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Bidang Cipta Karya			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.093.696.184	8.663.071.427	95,26
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.894.611.695	16.560.059.830	98,02
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.396.567.617	3.198.451.437	94,17
	Program Penataan Bangunan Gedung	7.205.415.201	6.954.056.576	96,51
	Bidang Bina Marga			
	Program Penyelenggaraan Jalan	7.708.072.426	6.795.693.409,78	88,16
	Bidang Pengairan			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.363.045.580	5.996.147.510	94,23
	Bidang Peralatan dan Perbekalan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.357.188	124.101.653	89,70
	Bidang Penataan Ruang			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	87.013.500	70.994.100	81,59
	Sekretariat			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.933.227.905	4.627.521.360	92,67



APBN/DAK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Bidang Cipta Karya			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.704.411.000	7.488.674.027	97,19
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.873.861.000	3.870.604.133	99,91

Adapun alokasi anggaran tahun 2025 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum berjumlah Rp. 25.987.067.879 untuk 2 program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Namun dari anggaran tersebut tidak sepenuhnya dianggarkan untuk pemenuhan SPM, sebanyak Rp. 2.724.592.020 dianggarkan untuk pembayaran utang tahun 2023. Berikut rincian alokasi anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.093.696.184	8.663.071.427	95,26
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air	814.412.640	731.389.200	89,81
-	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	574.872.544	443.008.200	77,06
-	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.704.411.000	7.488.674.027	97,20
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.894.611.695	16.560.059.830	98,02
-	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	41.565.000	40.065.000	96,39
-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	864.797.501	849.499.702	98,23
-	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	15.497.009.194	15.382.054.728	99,26
-	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.240.000	-	-



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	490.000.000	288.440.400	58,87

5. Dukungan Personil

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene adalah sebanyak 334 ASN orang, yang terdiri dari 50 orang PNS dan 25 orang PPPK Penuh Waktu dan 259 orang PPPK Paruh Waktu, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Bidang Cipta Karya	48
	Kepala Bidang	1
	JF. Teknik Penyelesaian Lingkungan	2
	Staf PNS	4
	Staf PPPK Penuh Waktu	6
	Staf PPPK Paruh Waktu	35
	Bidang Bina Marga	42
	Kepala Bidang Bina Marga	1
	JF. Teknik Jalan dan Jembatan	1
	Staf PNS	3
	Staf PPPK Penuh Waktu	1
	Staf PPPK Paruh Waktu	36
	Bidang Pengairan	72
	Kepala Bidang Pengairan	1
	JF. Teknik Pengairan	1
	Staf PNS	4
	Staf PPPK Penuh Waktu	7
	Staf PPPK Paruh Waktu	59
	Bidang Peralatan dan Perbekalan	67
	Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan	1
	Staf PNS	4
	Staf PPPK Penuh Waktu	3
	Staf PPPK Paruh Waktu	59
	Bidang Penataan Ruang	26
	Kepala Bidang Penataan Ruang	1
	JF. Penata Ruang	1
	Staf PNS	6
	Staf PPPK Penuh Waktu	5
	Staf PPPK Paruh Waktu	13



No.	Uraian	Jumlah Orang
	Sekretariat	65
	Sekretaris	1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
	Kasubag Keuangan	1
	JF. Perencana	1
	Staf PNS	13
	Staf PPPK Penuh Waktu	2
	Staf PPPK Paruh Waktu	46
	UPTD Pengolahan Air Limbah	14
	Kepala UPTD	1
	Kepala TU	1
	Staf PNS	-
	Staf PPPK Penuh Waktu	-
	Staf PPPK Paruh Waktu	12
	Total	334

Adapun Jumlah personil atau pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, khususnya Bidang Cipta Karya sebanyak 7 orang PNS dan 6 orang PPPK Penuh Waktu dan 35 PPPK Paruh Waktu

6. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan :

- Kondisi topografi beberapa wilayah penerima manfaat yang menyulitkan distribusi material dan teknis perpipaan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan di lapangan.
- Rendahnya kapasitas SDM dalam memahami tata cara penerapan dan pelaporan SPM berbasis aplikasi juga menjadi hambatan.
- Belum sempurnanya penerapan tahapan dan perhitungan dasar SPM

Solusi :

- Memastikan KSM dan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Tangki Septik (SPALD-S) bekerja sesuai petunjuk teknis dan tidak merugikan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
- Pengambilan data harus lebih disempurnakan agar realisasi dapat sesuai dengan apa yg direncanakan.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat daerah kabupaten/kota berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Standar Teknis Pelayanan Minimal terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

- **Target**

Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka yang menjadi target capaian adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni
- b. Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4. Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat Tahun 2025

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	KK	100%

2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	200%	Orang	
----	--	---	------	-------	--

- **Realisasi SPM**

Realisasi pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Majene Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.
Realisasi pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Majene Tahun 2025

No.	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1.	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	3673	8	KK	0,28%
2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	Orang	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa realisasi Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni dari 3673 unit rumah yang hanya terealisasi 8 unit atau 0,28% berupa pembangunan rumah relokasi di Kecamatan Ulumanda dan kecamatan Malunda, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 3665 unit masih berupa data dan belum dilaksanakan di Tahun 2025.

6. Alokasi Anggaran

Anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2025 adalah :

Tabel 6. Anggaran guna mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2025

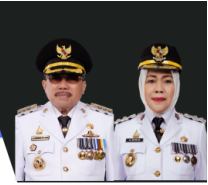
No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran	
				APBD (Rp)	APBN (Rp)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	3673	KK	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	Orang	-	-

7. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peertanahan Kabupaten Majene adalah Sebagai Berikut:

Tabel 7.
Dukungan Personil

NO.	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	1
	e. IV.b	-
2.	JABATAN FUNGSIONAL	6
3.	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV	6
	b. III	19
	c. II	1
	d. I	-
4.	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S2	14
	b. S1/DIV	10
	c. DIII	1
	d. SMA sederajat	1
	e. SLTP Sederajat	-



Sumber Daya Manusia pada Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku Dinas Teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas kurang mencukupi, namun secara kualitas sudah cukup memadai.

Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 30% dan tenaga non teknis sebanyak 70%, perbandingan jumlah tenaga teknis dan non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70 % untuk tenaga teknis dan 30% non teknis.

8. Permasalahan dan Solusi

- 1) Untuk penanganan bencana pemerintah daerah memberikan wewenang ini kepada BPBD sehingga Data SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten Majene banyak bersumber dari BPBD Kabupaten Majene .
- 2) Kejelasan terkait Zona Merah di Desa Kabiraan yang merupakan salah satu Lokasi lahan yang menjadi rencana Relokasi yang belum siap untuk di tempati

Solusi :

- 1) Diharapkan agar hal terkait Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota diarahkan ke BPBD Majene selaku leading sektor untuk penanganan bencana daerah.
- 2) Perlu segera mendapatkan data terkait kejelasan zona merah di desa kabiraan dengan melakukan koordinasi dengan Propinsi Sulawesi Barat terkait penyiapan lahan Relokasi dan mencari alternative relokasi mandiri untuk lahan permukiman warga.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

A. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Pada jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum indikator pencapaiannya adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar hal yang menjadi utama adalah mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 121 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten/kota dimana mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sub urusan TRANTIBUM sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Adapun jenis urusan wajib pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut ;

- Standar peningkatan kapasitas anggota SATPOL PP dan anggota perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas PERSONAL/SDM);
- Standar Operasional Prosedur SATPOL PP (SOP) penegakan PERDA TRANTIBUMLINMAS, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting serta pelaksanaan operasional patroli;
- Standar sarana dan prasarana SATPOL PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa, Gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional);
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan TRANTIBUM akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA dan PERKADA (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan);
- Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran PERDA dan PERKADA, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat);
- Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan PERDA dan PERKADA dan ditindaklanjuti dengan membawa kerumah sakit/pusat Kesehatan Masyarakat bila terkena cedera fisik sedang/berat);

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

2. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

A. Urusan Satpol PP dan Perlindungan masyarakat

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
NO	Indikator kinerja/jenis layanan SPM	Indikator pencapaian/ output		Total pencapaian	
	Kategori indeks pencapaian SPM Trantibum	Tuntas Utama		90 %	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUMLINMAS)			90%	
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80 %
	A. Jumlah yang harus dilayani				100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			10%	
	B. Jumlah mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang/jasa yang tersedia	Jumlah mutu barang/jasa yang belum tersedia	50 %
	1. Warga negara yang Pelayanan kerugian materil	0	0	0	0 %
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	0	0	0	0 %
	3. Standar Operasional Prosedur SATPOL PP	2	2	0	100 %
	4. Standar sarana dan prasarana SATPOL PP	40	40	0	100%
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota SATPOLPP dan anggota perlindungan masyarakat	1.473	1.473	0	71,56%



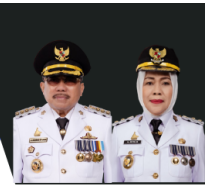
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA dan PERKADA	0	0	0	0 %
--	---	---	---	---	-----

No	Jenis pelayanan		Indikator pencapaian/output			Batas waktu Capaian 2025 (%)
			Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	
1.	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat					
		jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100 %	100%	Setiap tahun	

Capaian target dan rencana pembiayaan SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat Kabupaten Majene

No	Jenis pelayanan	Indikator	Capaian 2025 %	Target 2025 %	Program /Kegiatan	Rencana Pembiayaan	Target 2025 %	Program /kegiatan	Rencana pembiayaan
1	Pemeliharaan ketentraman & ketertiban Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	0%	55 %	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	NIHIL	60%	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada	NIHIL





1. Alokasi dan Realisasi tahun 2025

A. Urusan Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat** selama 1 Tahun Anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Keterangan
1	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum PERDA dan PERKADA	100 %	100 %	Membidangi Bidang Trantibun

Alokasi Anggaran APBD Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene tahun 2025 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
I	BELANJA DAERAH	6.361.295.180,00	6.187.605.808,00	97,27
1	Belanja Operasi	6.361.295.180,00	6.187.605.808,00	97,27
	Belanja Pegawai	3.800.825.580,00	3.726.854.608,00	98,05
	Belanja Barang dan Jasa	2.560.469.600,00	2.640.751.200,00	96,11

2. Dukungan Personil

A. Personil Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi Dinas. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene adalah sebanyak 48 orang dengan rincian sebagai berikut :



No.	Uraian	Jumlah Orang
	Bidang Trantibun	25
	Kepala Bidang Trantibun	1
	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	1
	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	1
	Staf	22
	Bidang Sumber Daya Aparatur	6
	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	1
	Kepala Seksi Teknis Fungsional	1
	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	1
	Staf	3
	Bidang Penegakan Perda	6
	Kepala Bidang Penegakan Perda	1
	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1
	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi	1
	Staf	3
	Sekretariat	9
	Kasat	1
	Sekretaris	1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
	Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
	Staf	5
	Jabatan Fungsional	2
	Total	48

1. Permasalahan yang Dihadapi

A. Permasalahan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum permasalahan yang dihadapi **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat** terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

- Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur terutama PPNS dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- Kurangnya peran serta Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kab. Majene
- Belum memiliki Gedung kantor sendiri maupun Gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran

d) Belum sinerginya upaya implementasi SPM dengan Kegiatan yang dilaksanakan;

Adapun solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu:

- Adanya penambahan anggaran agar dapat melaksanakan penanganan pelanggaran PERDA/PERKADA secara optimal.

B. Urusan BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	
		%	Tahun
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	2025
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	2025
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	2025
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	2025

Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Tahun 2025
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	87,50 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	94,67 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	59,30 %

A. Urusan BPBD

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang Trantibunlinmas tahun 2025 pada sub urusan kebencanaan dan sub urusan pemadam kebakaran sebesar Rp 1.128,115,800 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh

Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus rupiah)

1. Dukungan Personil

A. Personil Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi Dinas. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene adalah sebanyak 48 orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Bidang Trantibun	25
	Kepala Bidang Trantibun	1
	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	1
	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	1
	Staf	22
	Bidang Sumber Daya Aparatur	6
	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	1
	Kepala Seksi Teknis Fungsional	1
	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	1
	Staf	3
	Bidang Penegakan Perda	6
	Kepala Bidang Penegakan Perda	1
	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi	1
	Staf	3
	Sekretariat	9
	Kasat	1
	Sekretaris	1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
	Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
	Staf	5
	Jabatan Fungsional	2
	Total	48

B. Personil BPBD

1. Status Kepegawaian

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 30 Orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 88 Orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu : 62 Orang

2. Latar belakang Pendidikan

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

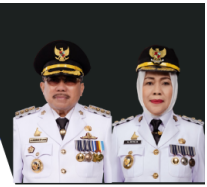
- Magister (S2) : 5 Orang
- Sarjana (S1 /DIV) : 8 Orang
- SLTA : 14 Orang
- SLTP : 3 Orang

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

- Sarjana (S1 /DIV) : 1 Orang
- SLTA : 87 Orang

c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

- Sarjana (S1 /DIV) : 10 Orang



- Diploma (DIII) : 4 Orang
- SLTA : 48 Orang

3. Golongan/Pangkat

- Golongan IV : 5 Orang
- Golongan III : 15 Orang
- Golongan II : 10 Orang

2. Permasalahan yang Dihadapi

A. Permasalahan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum permasalahan yang dihadapi **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat** terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a. Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur terutama PPNS dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dilapangan;
- b. Kurangnya peran serta Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kab. Majene
- c. Belum memiliki Gedung kantor sendiri maupun Gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran
- d. Belum sinerginya upaya implementasi SPM dengan Kegiatan yang dilaksanakan;

Adapun solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu:

- a. Adanya penambahan anggaran agar dapat melaksanakan penanganan pelanggaran PERDA/PERKADA secara optimal.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggota SATPOL PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakkan PERDA/PERKADA untuk menciptakan Kabupaten Majene yang aman, tertib dan kondusif.

B. Permasalahan BPBD



Secara umum permasalahan yang dihadapi **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene** terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM

4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kebijakan umum pembangunan daerah Tahun 2021 - 2026 menggambarkan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah telah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial ada 5 jenis pelayanan dasar yang harus dipedomani oleh Dinas Sosial, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti;
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial Khusus gelandangan dan pengemis diluar panti;
5. Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Namun untuk saat ini jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Majene mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten/ Kota :

1. Pelaksanaan Program/kegiatan Bidang Sosial
2. Penyediaan sarana dan Prasarana Sosial

3. Penanggulangan Korban Bencana

2. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM **Dinas Sosial Kab. Majene** pada Bidang Sosial pada tahun 2021-2026 Kabupaten Majene berdasarkan RPJMD/Renja.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	Setiap Tahun	Membidangi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh **Dinas Sosial** selama 1 Tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi	Keterangan
----	-----------------------	----------------------	----------------	-----------	------------



1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100 %	100,00 %	Membidangi Bidang Pemberdayaan Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100 %	100,00 %	Membidangi Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %	100,00 %	Membidangi Bidang Perlindungan dan jaminan sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %	100,00 %	Membidangi Bidang Perlindungan dan jaminan sosial
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100,00 %	Membidangi Bidang Perlindungan dan jaminan sosial

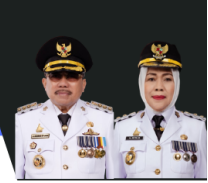
Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 capaian SPM untuk jenis pelayanan pemberian Bantuan Sosial bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yaitu 100,00 %. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 100 % dimana pada tahun sebelumnya capaiannya hanya 100 %. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan alokasi anggaran pada kegiatan – kegiatan yang terkait dengan jenis pelayanan ini, dimana pada tahun ini Realisasi alokasi anggaran Rp. **1.499.316.077,-**

3. Alokasi Anggaran

APBD Dinas Sosial Kabupaten Majene

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Bidang Pemberdayaan sosial			
	Program Pemberdayaan Sosial	50.000.000	-	-
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	63.360.000	59.040.000	93,18 %





No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial			
	Program Rehabilitasi sosial	270.317.588	193.486.080	71,58%
	Sekretariat			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.327.757.814	1.246.789.997	91,16 %
	JUMLAH	1.751.435.402	1.499.316.077	85,60 %

4. Dukungan Personil

Jumlah seluruh Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Majene telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil Dan ASN yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten. Majene adalah sebanyak 17 orang. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Orang
	Bidang Pemberdayaan Sosial	6
	Kepala Bidang	1
	Penyuluh Sosial	1
	Penyuluh Sosial	1
	PPP 2024	1
	PPP2025	2
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2
	Kepala Bidang	1
	Staf PNS	1
	Bidang Rehabilitasi Sosial	4
	Kepala Bidang	1
	Penyuluh Sosial	1
	PPP 2025	2
	Sekretariat	5
	Sekretaris	1
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1
	Perencana Ahli Muda	1
	Bendahara Pengeluaran	1
	Bendahara Barang	1
	Total	17

6. Permasalahan yang dihadapi

Secara umum permasalahan yang dihadapi **Dinas Sosial Kab. Majene** terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran / APBD;
- Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- Belum sinerginya upaya implementasi SPM





- d. Adanya Recofusing/Pengurangan Anggaran
- e. Adanya Anggaran yang belum realisasi disebabkan kurangnya anggaran PAD.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN

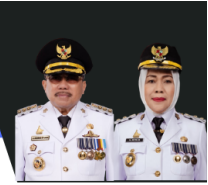
Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga
Kabupaten Majene Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI (Rp)
	Urusan Pendidikan Kab. Majene	8.986.796.310
A.	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	2.964.811.369
1	Angka Partisipasi Sekolah	1.843.797.815
	a. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	291.243.874
	b. RPenyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	98.805.200
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	316.696.518
	d. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang PendidikanPengadaan Mebel PAUD	1.137.052.223
2	Kekhususan PAUD	1.121.013.554
	a. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	725.873.554
	b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	203.151.000
	c. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	191.989.000
B.	Program SPM Pendidikan Sekolah Dasar	3.416.709.983
1	Angka Partisipasi Sekolah	2.931.837483
	a. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.138.248.515
	b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.793.588.968
2	Literasi dan Numerasi	421.109.000
	a. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	384.025.000
	b. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-
	c. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	37.084.000





3	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusifitas	63.763.500
	a. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	63.763.500
C.	Program SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.605.274.958
1	Angka Partisipasi Sekolah	2.038.910.958
	a. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	874.065.552

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI (Rp)
	b. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.164.845.406
2	Literasi dan Numerasi	498.617.000
	a. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	416.630.000
	b. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000
	c. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
	d. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-
	e. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	31.987.000
	f. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	-
3.	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusifitas	67.747.000
	a. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	-
	b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	67.747.000
D	Program SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin dalam rangka peningkatan APK Paud, tumbuh dan berkembangnya peserta didik pendidikan anak usia dini sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan usia mereka, dan meningkatkan kesiapan lulusan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Pelayanan pendidikan anak usia dini melalui jalur formal Taman Kanak- Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan jalur non formal berbentuk satuan



PAUD sejenis, kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak.

Berkenaan dengan hal di atas maka Pendidikan bagi anak-anak di usia dini juga mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah Kabupaten Majene, hal tersebut dengan ketersediaan layanan pendukung bagi siswa PAUD.

Layanan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan mencakup pengembangan kreativitas anak, Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD, dan pelatihan tenaga pendidik PAUD. Capaian indikator kinerja Program PAUD didukung dengan ketersediaan lembaga dan tenaga pendidik PAUD yang memadai hal ini karena sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti jenjang pendidikan usia dini.

2. Pengelolaan Pendidikan Dasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Ada beberapa indikator pendidikan diantaranya angka transisi, angka drop out, angka repetisi, angka partisipasi, dan lain-lain. Indikator angka partisipasi umumnya berkaitan dengan keberhasilan suatu daerah dalam mendorong anak usia sekolah agar dapat bersekolah.

Angka partisipasi dibagi dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APK dan APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah dilihat dari partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Sistem pendidikan yang baik dan bermutu di samping harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dengan paradigma yang jelas, juga mesti berusaha diletakkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas menyebutkan bahwa tugas pengelolaan sekolah adalah pada pemerintah daerah, artinya pemenuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan seharusnya menjadi beban daerah. Beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah terbukti memiliki APK rendah pula, artinya daerah tersebut sudah jelas tidak mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK) dan Dana Dekonsentrasi.

3. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan Angka partisipasi Sekolah (APS) yang pada tahun 2025 untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas menargetkan 41.10 dan hanya mampu merealisasikan 2025 sebesar 36,97.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat dari aspek kualitas tenaga pendidik, diantaranya jumlah guru yang bersertifikat maupun persentase guru SD dan SMP yang berkualifikasi S1. Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dilaksanakan melalui kegiatan kualifikasi dan sertifikasi guru guna memenuhi standar pendidikan.

5. Tata kelola Pendidikan

Masalah Manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan termasuk diantaranya sanitasi, seperti WC guru dan siswa, kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi yang lengkap yang terhubung dengan jaringan Pendidikan Nasional dan bagi pemberdayaan tenaga pendidikan.



4.7 2. URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 476.312.950,-	Rp. 476.034.750,-	99,94 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 283.933.250,-	Rp 269.441.000,-	94,90 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir	Rp. 95.178.000,-	Rp. 95.178.000,-	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 159.265.000,-	Rp. 83.865.000,-	52,66 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	Rp. 456.886.100,-	Rp 455.978.000,-	99,80 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)	Rp. 150.478.400,-	Rp. 144.997.750,-	96,36 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut ($\geq$ 60 Tahun)	Rp. 68.000.000,-	Rp. 47.992.500,-	70,58 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 0	Rp. 0	-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Rp. 281.110.092,-	Rp. 281.110.092,-	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Rp. 0	Rp. 0	-
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp. 741.664.700,-	Rp. 732.175.750,-	98,72 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Rp. 78.640.000,-	Rp. 63.858.000,-	81,20 %
Total Anggaran		Rp. 2.791.468.492,-	Rp. 2.650.630.842,-	94,95%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk memenuhi target pelayanan Minimal adalah 94,95%, serapan belum maksimal ini dibarengi dengan capaian layanan yang tidak sesuai target karena terdapatnya gap kebutuhan dengan realisasi anggaran yang seharusnya

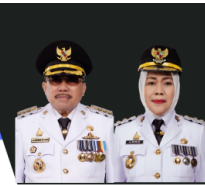


dibutuhkan untuk mencapai target 100% pada pemenuhan komponen Standar Pelayanan Minimal.

4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kab. Majene dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Anggaran
A	APBD				
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	814.412.640
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	574.872.544
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	-
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	41.565.000
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air	Beroperasi dan Terpeliharanya	864.797.501



No	Program	Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Indikator Kinerja Outcome	Anggaran
		(SPALD)	Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	15.497.009.194
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	490.000.000
Jumlah (A)					14.408.795.879

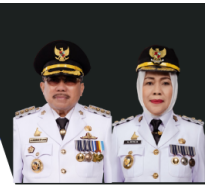
4.7.4 URUSAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Berdasarkan Program kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) tidak terlepas dari tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman. Untuk dapat merealisasikan tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut, maka perlu disusun program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mengalokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada tahun 2025 ini Dinas Perumahan dan Permukiman dapat menggarkan untuk kegiatan pencapaian SPM dan Ada beberapa sumber anggaran dari lain – lain yang dapat memenuhi pencapaian SPM tersebut yaitu seperti tabel di bawah ini :

Tabel 8.
Program dan Kegiatan pendukung penerapan dan pencapaian SPM

No.	Pendanaan	Pagu (Rp.)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket.
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	9.387.000,-	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kab/kota	DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	9.387.000,-	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-lahan potensisebagai lokasi relokasi perumahan	DPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Majene
3	Alokasi Anggaran	5.875.000,-	Program	Pendataan Penyediaan dan	Pendataan Tingkat	DPA Dinas





	Satker Perangkat Daerah		Pengembangan Perumahan	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. majene
--	-------------------------	--	------------------------	--	--------------------------------	---

4.7 5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Program dan Kegiatan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Majene Tahun 2025 sebagai berikut :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM program pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Majene Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majene Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah Kabupaten/kota	Penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa (SATPOL PP)	Rp.0,-



2.	Standar sarana dan prasarana SATPOL PP	Standar sarana dan prasarana SATPOL PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa, Gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional);	Rp.0 ,-
----	--	--	---------

B. Program dan Kegiatan Urusan BPBD

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024, program yang tercakup adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

4.7.5 URUSAN SOSIAL

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Majene, program yang tercakup adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah;
2. Program pemberdayaan social;
3. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
4. Program rehabilitasi social;
5. Program perlindungan dan jaminan social;
6. Program penanganan bencana;
7. Program taman makam pahlawan;

BAB V

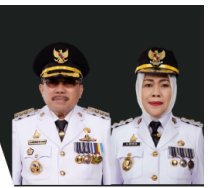
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yang lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2022 yang mencakup Perencanaan Pembangunan Daerah; Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas : (1) Capaian Kinerja Makro, (2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, (3) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; (4) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan (5) Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Berbagai prestasi dan keunggulan serta kekurangan selama kurun waktu 2023 telah disusun dan dilaporkan melalui LPPD ini.

LPPD akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan pada kurun waktu kedepan sehingga pelaksanaan beberapa tugas Urusan Wajib Pelayanan Dasar atau Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah serta Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat lebih terarah dan maksimal sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan capaian kinerja program / serta permasalahan dan alternatif solusi.

Permasalahan yang dihadapi dan tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2025 selanjutnya dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Melalui LPPD ini, juga diharapkan sebagai masukan dari *stakeholder* dalam memberikan pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini bukan hanya sekedar formalitas belaka.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah sebagai laporan secara tertulis sesuai format baku yang telah ditetapkan sebagai sebuah harapan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara sinergitas, keterpaduan dan kesepahaman serta kerjasama dari seluruh unsur OPD dan didukung masyarakat selama kurun tahun 2025 di wilayah Kabupaten Majene sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi secara bersama dan terpadu.



Pemerintah Kabupaten Majene telah berusaha memenuhi komitmen sebagai upaya moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi potensi pada setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene dimasa mendatang. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya adalah penyelenggaraan Urusan Konkuren, Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum; Tugas Pembantuan; dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Adapun hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan di beberapa urusan, tetapi secara keseluruhan menunjukkan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil tersebut dicapai berkat kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Majene dan didukung dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan partisipasi dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat. Dengan terselesaikannya laporan ini, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak pada setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Majene yang telah terlaksana secara harmonis dan ideal dengan mengedepankan slogan **“MAJENE MAJU, MANDIRI DAN BERBUDAYA”** dapat menjadi spirit dalam membangun Majene kedepan, dan harapan kami semoga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua.

